



**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
KELURAHAN DI WILAYAH KECAMATAN WAJO
KOTA MAKASSAR**

PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	09-07-08
Asal Dari	FAK. SOSPOL.
Banyaknya	1 exp
Harga	HADIAH
No. Inventaris	020709136
KIP:	



ANDI ZULFITRI

94 08 108

**JURUSAN ILMU POLITIK PEMERINTAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2001**

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari Senin tanggal 06 Oktober 2001,

Skripsi atas nama : ANDI ZULFITRI

Nomor Pokok : 94 08 108

Telah diterima oleh panitia Ujian Sarjana Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana.

PANITIA UJIAN

Ketua : Drs. H. A. Rahman Kotta, SU

Sekretaris : Drs. Abd. Salam Muchtar

Anggota : 1. Drs. A. Gau Kadir, MA

2. Dra. Indar Arifin, M.Si,

3. Drs. A. M. Rusli, M.Si

The image shows four handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. A large, stylized signature for the Chairman (Drs. H. A. Rahman Kotta). 2. A signature for the Secretary (Drs. Abd. Salam Muchtar). 3. A signature for the first member (Drs. A. Gau Kadir). 4. A signature for the second member (Dra. Indar Arifin). The signature for the third member (Drs. A. M. Rusli) is not clearly visible but is implied by the list.

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
 PEMBANGUNAN KELURAHAN DI WILAYAH
 KECAMATAN WAJO KOTA MAKASSAR

NAMA : ANDI ZULFITRI

NO.POKOK : 94 08 108

PROGRAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN

Diajukan Sebagai Bahan Skripsi Pada Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan
 Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
 Universitas Hasanuddin

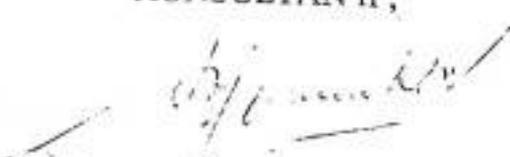
Makassar, 2001

Menyetujui,

KONSULTAN I,


DR. FARIED ALI, SH, MS

KONSULTAN II,


DRS. ABDUL SALAM MUCHTAR

Mengetahui;
 Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Hasanuddin


DRS. A. SYAMSUDDIN, MS
 NIP. 30785086



KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang tak terhingga penulis persembahkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana.

Disadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dilihat dari materi yang disajikan, formulasi kalimatnya maupun dari teknik penulisannya. Oleh karena itu kritik yang sifatnya membangun dari pembaca terutama kepada Bapak Dosen Pembimbing, penulis sangat harapkan. Semoga dengan tegur sapa, kritik membangun tersebut dapat lebih menyempurnakan skripsi ini.

Selanjutnya disadari pula bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak serta dorongan dari keluarga, teman-teman se-Kampus dan juga terutama dari Bapak Ketua Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Dosen Pembimbing I dan II, dan banyak pihak yang membantu penulis, tanpa bantuan dari mereka penulis tak akan mampu menyelesaikan tugas akhir ini.

Sehubungan dengan itu penulis memohon kepada Allah SWT kiranya segala upaya dan niat yang Ikhlas dan semua pihak yang berkenaan membantu saya, dibalas dengan dengan imbalan yang setimpal oleh-Nya. Dan ungkapan rasa terima kasih penulis peruntukkan kepada :

- Bapak Prof. Dr. Ir. Radi. A. Gany selaku Rektor UNHAS Makassar
- Bapak Dr. M. Tahir Kasnawi, SU selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNHAS
- Bapak Drs. A. Syamsuddin, MS selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan
- Bapak DR. Faried Ali, SH, MS dan Bapak Drs. Abdul Salam Muchtar selaku Dosen Pembimbing Satu dan Dua
- Para staf administrasi di lingkungan Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya kepada penulis
- Bapak Kepala Wilayah Kecamatan Wajo Kota Makassar
- Bapak dan Ibu Kepala Cabang Dinas P & K Kecamatan Wajo



- Ayahanda (almarhum) dan Ibunda tercinta yang sabar membimbing dan membiayai penulis, adik-adikku Satti dan Jaya serta teman-teman di Potlot 15 Mangasa
- Terkhusus kepada Keluarga besar H. A. Ebe atas bantuan fasilitas materiil maupun moril serta supportnya yang membuat penulis (akhirnya) dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
- Kakanda : Ato', Ridho, Udhin, Iwan di Arista dan Flamboyan Komputer atas bantuan support, pikiran dan teknis penulisannya. Buat Saudari Ila terimakasih atas semua bantuan pengetikannya.
- Teman-teman di FISIP Unhas serta sahabat dan senior-ku di HIMAPEM : Jody, Hasbar, Sahur, Wahyuddin (Yayu'), Sudirman, Hamka, Acho, Musriwan, Ilham Halim, Sulfikar, Fitri, Erni, Yasmin, Anna, Sulfan, yang selalu membantu dan mengingatkan akan tanggung jawab saya sebagai seorang pelajar, juga atas supportnya ketika penulis merasa putus asa dalam penyelesaian skripsi ini.
- Semua pihak yang membantu saya dan tak sempat disebut namanya satu persatu

Tanpa bantuan kalian semua Skripsi ini tak akan dapat terselesaikan. Wassalam

Makassar, 4 September 2001

penulis

ABSTRAKSI

Wilayah Kecamatan Wajo adalah salah satu wilayah kerja perangkat Pemerintah Daerah KOTA MAKASSAR yang terbagi dalam 8 Kelurahan di mana letak geografisnya amat strategis karena berada di jantung Kota Makassar.

Kondisi strategis ini menyebabkan Kecamatan Wajo patut menjadi sorotan berbagai kalangan baik pemerintahan Kota Makassar sendiri maupun dari masyarakat luar kota termasuk masyarakat akademik, para peneliti maupun praktisi lainnya.

Dari beberapa hal yang menjadi pusat perhatian masyarakat di Kecamatan Wajo Kota Makassar, salah satunya ialah menyangkut “ partisipasi masyarakatnya dalam pembangunan di setiap kelurahan”.

Bertolak dari beberapa hal tersebut, penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini mencoba untuk meneliti hal tersebut dengan judul penelitian “ **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KELURAHAN DI KECAMATAN WAJO KOTA MAKASSAR** “ dengan tujuan untuk dapat mengetahui sejauhmana tingkat partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan Kelurahan di Kecamatan Wajo.

Menurut anggapan ada beberapa faktor pendukung maupun faktor penghambat adanya partisipasi masyarakat yaitu pemerintah setempat, karena itu turut pula di sorot mengenai peranan pemerintah dalam memotivasi masyarakat untuk ikut secara aktif dalam proses pembangunan, sejauh mana Camat dan Lurah mengadakan pembinaan , pengarahan, penjelasan kepada masyarakat.

Hasil penelitian dua unsur tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di dalam pembangunan Kelurahan di Kecamatan Wajo Kota Makassar setelah di skor secara keseluruhan bernilai “ cukup baik “ kecuali partisipasi fisik yang bernilai “tinggi”.

Selanjutnya mengenai tingkat pembinaan, pengarahan pemerintah kepada masyarakat setelah dihitung dan di skor secara keseluruhan menunjukkan nilai “ rendah “

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAKSI	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Kerangka Teori.....	4
E. Metode Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Partisipasi Masyarakat	13
B. Peranan Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	19
C. Pembangunan Kelurahan	21
D. Strategi Pembangunan di Indonesia	25
BAB III. GAMBARAN SINGKAT WILAYAH KECAMATAN WAJO KOTA MAKASSAR	
A. Keadaan Geografis	35
B. Keadaan Penduduk, Agama dan Pendidikan	36
C. Mata Pencaharian	41
D. Kelembagaan Kelurahan	43

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Usaha-Usaha Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	52
B. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	69
BAB V. PENUTUP	94
A. Kesimpulan	95
B. Saran-Saran	96
DAFTAR KUTIPAN.....	97
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	99
LAMPIRAN :	
- PERDA Kota Makassar no. 16 / DPRD/ II. Tanggal 23 Desember 2000 tentang struktur organisasi Kelurahan.	
- Struktur Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.	

DAFTAR TABEL

1. Tabel III. 1	Jumlah Penduduk Kecamatan Wajo Kota Makassar	36
2. Tabel III. 2	Jumlah Penduduk Usia Produktif di Kecamatan Wajo Kota Makassar	37
3. Tabel III. 3	Jumlah Penduduk Usia 46 sampai 60 keatas di Kecamatan Wajo Kota Makassar	37
4. Tabel III. 4	Jumlah Penduduk Menurut Agama Kecamatan Wajo	38
5. Tabel III. 5	Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Wajo	39
6. Tabel III. 6	Jumlah Sekolah menurut Siswa	40
7. Tabel III. 7	Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian (Usia Produktif).....	41
8. Tabel IV. 1	Tingkat Pemberian Penyuluhan/Penerangan dari Pemerintah Sebelum dan Selam Krisis Ekonomi dalam 5 Tahun Terakhir.....	52
9. Tabel IV. 2	Tingkat Pemberian Pengarahan oleh Pemerintah Sebelum & Selama Krisis Ekonomi Dalam 5 tahunTerakhir	54
10. Tabel IV. 3	Tingkat Pemberian Bimbingan/Pembinaan oleh Pemerintah Sebelum dan Selama Krisis ekonomi Dalam 5 tahunTerakhir	56
11. Tabel IV.4	Tingkat Pemberian Bantuan Dana/Fasilitas Oleh Pemerintah Sebelum & Sesudah Krisis Dalam 5 tahunTerakhir	59
12. Tabel IV.5	Tingkat Penyelenggaraan Perlombaan Oleh Pemerintah Sebelum & Sesudah Krisis ekonomi Dalam Jangka Waktu5 tahunTerakhir	63

13. Tabel IV.6	Tingkat Penghargaan/Pujian oleh Pemerintah Sebelum & Sesudah Krisis ekonomi Dalam 5 tahunTerakhir	63
14. Tabel IV.7	Tingkat pelibatan Masyarakat Dalam Proyek yang Dilaksanakan Sebelum & Sesudah Krisis ekonomi Dalam 5 tahunTerakhir	65
15. Tabel IV.8	Responden Menurut pendidikan dan Tempat Tinggal.....	67
16. Tabel IV.9	Responden menurut Lama Tinggal	68
17. Tabel IV.10	Responden Menurut Umur.....	68
18. Tabel IV.11	Responden Menurut Pekerjaan	69
19. Tabel IV.12	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam memberikan Pendapat, Ide, dan masukan dalam Rapat Pertemuan Sebelum & Selama Berlangsungnya Krisis ekonomi Untuk Jngka Waktu 5 Tahun	72
20. Tabel IV.13	Tingkat Partisipasi Non Fisik Masyarakat Dalam Memberikan Pendapat, Ide dan Masukan Sebelum & Sesudah Berlangsungnya Krisis.....	75
21. Tabel IV.14	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Kerja Bakti/Gotong royong Sebelum & Selama berlangsungnya Krisis Ekonomi untuk Jangka waktu 5 Tahun	77

22. Tabel IV.15	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam memberikan Sumbangan Dana/uang Sebelum & Selama Krisis Ekonomi untuk jangka waktu 5 Tahun Terakhir	80
25. Tabel IV.16	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Memberikan Dana/uang Sebelum Krisis Ekonomi Menurut Pekerjaan	81
26. Tabel IV.17	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Memberikan dana/uang sebelum Krisis Ekonomi Menurut Pekerjaan	82
27. Tabel IV.18	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Menyumbang Barang/Materi dalam Pembangunan Sebelum Krisis Ekonomi untuk % Tahun Terakhir	84
28. Tabel IV.19	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam menyumbang Barang/Materi Dalam Pembangunan Selama Krisis, untuk 1 Tahun Terakhir	84
29. Tabel IV.20	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Menyumbang Barang/Materi Sebelum Krisis Menurut Keikutsertaan dalam Proses Perencanaan Pembangunan	86
30. Tabel IV.21	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Menyumbang Barang/Materi	

	Selama Krisis Ekonomi Menurut Keikutsertaan Dalam Perencanaan Pembangunan	86
31. Tabel IV.22	Kesesuaian Harapan/Kebutuhan Masyarakat Terhadap Hasil Pembangunan yang Telah di Laksanakan Sebelum dan Selama Krisis Ekonomi Dalam 5 Terakhir	88

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan Kelurahan di wilayah perkotaan mempunyai arti yang sangat penting bahkan boleh dikatakan bahwa pembangunan daerah, khususnya daerah perkotaan sebagai bagian yang integral daripada pembangunan nasional sangat ditentukan oleh pembangunan disetiap Kelurahan.

Keberhasilan pembangunan Kelurahan merupakan wujud daripada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dan pada gilirannya akan mempercepat rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas wilayah yang sehat dan dinamis. Untuk terciptanya kondisi demikian salah satu faktor penentu ialah secara aktif dari seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat kelurahan di Kecamatan Wajo Kota Masyarakat.

Oleh karena itu dalam Buku III Pemanduan dan Berbagai Program Pembangunan Masyarakat Desa di jelaskan bahwa :

“Keikut sertaan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan dari setiap upaya pembangunan”⁽¹⁾

Dengan berdasarkan kepada pendekatan bahwa pembangunan dilaksanakan dari, oleh, serta untuk rakyat. Maka pada pelita VI kebijakan pembangunan diarahkan pada adanya keseimbangan antara pembangunan di

pusat dan daerah, keseimbangan pembagian hasil-hasilnya untuk mempercepat terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dimana belum nampak mulai dari pelita I sampai pada pelita V. Semakin terasa kesenjangan antara pembangunan di pusat dengan yang berada di daerah-daerah dilihat dari pembangunan fisik-material. Dengan menyadari hal tersebut maka arah kebijakan pembangunan dengan mengembangkan otonomi daerah dimana masyarakat tidak hanya diharapkan untuk dapat mendukung kebijaksanaan pembangunan yang diprakarsai oleh pemerintah (Top Down), tapi masyarakat sudah berkewajiban memberikan di lingkungannya masing-masing sedangkan pemerintah hanya sebagai fasilitator yaitu memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan serta sarana yang belum mampu diadakan oleh setiap masyarakat disetiap kelurahan.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan merupakan syarat mutlak bagi berhasilnya otonomi daerah, namun kenyataan di masyarakat masih ada yang menganggap bahwa pembangunan adalah tanggung jawab pemerintah semata.

Berdasar atas pandangan tersebut diatas ada beberapa alasan dipilihnya judul penelitian **“PARTISPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KELURAHAN DI WILAYAH KECAMATAN WAJO KOTA MAKASSAR”** sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukan sekedar sebagai keterlibatan dari segi jasmani saja tapi meliputi kesediaan mental, kesediaan memberikan sumbangan pikiran maupun dana untuk terciptanya kesejahteraan bersama

dan yang lebih penting adalah rasa tanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan daripada hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

2. Kenyataan di masyarakat khususnya di Kecamatan Wajo ada indikasi ketidakpedulian masyarakat terhadap pembangunan baik dari segi perencanaan, pelaksanaan serta rasa tanggung jawab atas pemeliharaan hasil - hasil pembangunan.
3. Keterbukaan pemerintah untuk menerima kritik dan memberikan peluang yang besar kepada masyarakat untuk memikirkan nasibnya sendiri akan lebih mempercepat terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dasar penelitian terdahulu, maka penulis ingin merumuskan yang ingin diteliti supaya tidak meyulitkan dalam mengumpulkan data yang diperlukan.

Adapun rumusan masalah dapat dilihat sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan Kelurahan di Kecamatan Wajo Kota Makassar.
2. Bagaimana tingkat kepedulian masyarakat memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.
3. Bagaimana tingkat sosialisasi program pembangunan Kelurahan yang telah dilakukan oleh pemerintah di Kecamatan Wajo Kota Makassar.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tingkat partisipasi dalam pembangunan kelurahan di Kecamatan Wajo Kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui tingkat kepedulian masyarakat memelihara hasil-hasil pembangunan di Kecamatan Wajo Kota Makassar.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah mensosialisasikan seluruh program pembangunan di Kecamatan Wajo Kota Makassar.

2. Kegunaan penelitian

- a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah baik Lurah maupun Camat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan di Kecamatan Wajo Kota Makassar.
- b. Sebagai salah satu faktor pendukung berbagai pihak baik pemerintah dalam hal ini Lurah se-Kecamatan Wajo maupun Camat Wajo, juga warga masyarakat Wajo dalam meningkatkan perannya masing-masing dalam pembangunan.

D. Kerangka Teori

Meskipun konsepsi tentang pembangunan di negara-negara sedang berkembang dari masa ke masa mengalami perkembangan dimana awal perkembangannya seluruhnya ditentukan dari tingkat atas mulai perencanaanya, dana sampai pada teknis pelaksanaanya, semua ditentukan lebih dahulu oleh

pemerintah. Dewasa ini telah mengalami perubahan atau paradigma baru dimana masyarakat tidak hanya diharapkan mendukung program dari pemerintah tetapi masyarakat sudah berkewajiban untuk menentukan nasibnya sendiri dalam kerangka tetap dalam kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat semakin diharapkan agar terlibat langsung dalam proses pembangunan disegala bidang, namun pemerintah masih tetap memegang peranan penting terutama dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, **Lockman Soetrisno** mengatakan bahwa:

“Dinegara berkembang termasuk Indonesia, negara atau pemerintah mempunyai peranan yang sangat dominan dalam proses pembangunan Negara tidak hanya merupakan sumber dana melainkan juga sebagai perencanaan sekaligus pelaksana pembangunan”⁽²⁾.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah sebagai penanggung jawab utama, minimal sebagai moderator fasilitator dalam setiap langkah pembangunan. Karena itu dalam wilayah Kecamatan Wajo, Camat dan seluruh aparatnya termasuk seluruh Lurah-nya masih tetap memegang peranan penting terutama dalam hal membangkitkan semangat untuk berpartisipasi di berbagai proses pembangunan.

Sosialisasi tentang seluruh program pembangunan kepada masyarakat akan lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat bila secara langsung disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini Camat atau Lurah dibanding bila program pembangunan tersebut hanya didengarkan melalui sesama warga

Pernyataan ini berdasarkan pandangan bahwa pemerintah mempunyai wibawa khusus yang dapat mendorong masyarakat bisa berpartisipasi. Selain itu karena pemerintah memang mengetahui tujuan program secara mendalam, sehingga pada saat sosialisai program kepada masyarakat tujuan dan mamfaat program pembangunan yang akan dilaksanakan secara utuh didengarkan dan dihayati dengan baik.

Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari bahwa seorang atau sekelompok orang akan tergerak hatinya berpartisipasi terhadap suatu kegiatan diminta atau tidak diminta, bila ia merasa bahwa kegiatan tersebut akan menguntungkan bagi dirinya, minimal dapat merasakan manfaat dari hasil tersebut secara langsung dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Kecenderungan semacam ini bila dikaitkan proses pembangunan hasilnya tidak semata-mata bernilai material yang dapat dibagi-bagi dan dinikmati secara perorangan, hasil daripada program pembangunan pada umumnya dapat dinikmati secara kolektif dan kadang tidak dapat disadari bahwa itu adalah hasil pembangunan.

Menyadari hal ini peranan pemerintah sangat strategis dan menentukan untuk membangkitkan semangat, sehingga masyarakat mau berpartisipasi dalam arti mau menyumbangkan pikiran, tenaga serta dana atau material untuk menyukseskan program yang telah di tetapkan bersama.

Keith Davis mengemukakan pengertian partisipasi sebagai berikut:

"Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong untuk

memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan”⁽³⁾

Dari definisi tersebut ada beberapa unsur yang dapat diterapkan dalam bidang pembangunan, antara lain sebagai berikut:

- “1. Partisipasi lebih melibatkan keterlibatan mental dari pada hanya keterlibatan jasmani.
1. Unsur kedua adalah kesediaan memberikan suatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Ini berarti bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok atau seseorang untuk menjadi anggota dengan segala nilainya.
2. Unsur ketiga adalah tanggung jawab. Unsur tersebut adalah merupakan segi yang paling menonjol dari rasa menjadi anggota kelompok.”⁽⁴⁾

Berdasarkan defenisi tersebut, maka yang dimaksud partisipasi dalam tulisan ini adalah kesediaan atas dasar kesadaran dengan penuh rasa tanggung jawab baik pikiran, tenaga keahlian maupun uang atau barang material menyukseskan program pembangunan Kelurahan dapat didefinisikan sebagai berikut :

“Pembangunan Desa/Kelurahan diartikan sebagai proses usaha masyarakat yang dipersatukan dan usaha dari pemerintah dan maksud memperbaiki syarat-syarat ekonomi, sosial dan budaya serta menyatukan usaha tersebut ke dalam kehidupan bangsa agar mereka berkemampuan untuk menyumbangkan sebesar-besarnya pada program Pembangunan Nasional”⁽⁵⁾

Dengan demikian pembangunan Kelurahan dapat diartikan sebagai proses usaha yang timbul untuk menciptakan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mapan dan budaya tinggi dan positif melalui partisipasi dan dorongan bimbingan pemerintah, dan hal ini Camat dan Lurah setempat.

Selanjutnya mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dikemukakan sebagai berikut :

“Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam program-program pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan memanfaatkan serta menikmati hasil – hasil pembangunan”⁽⁶⁾

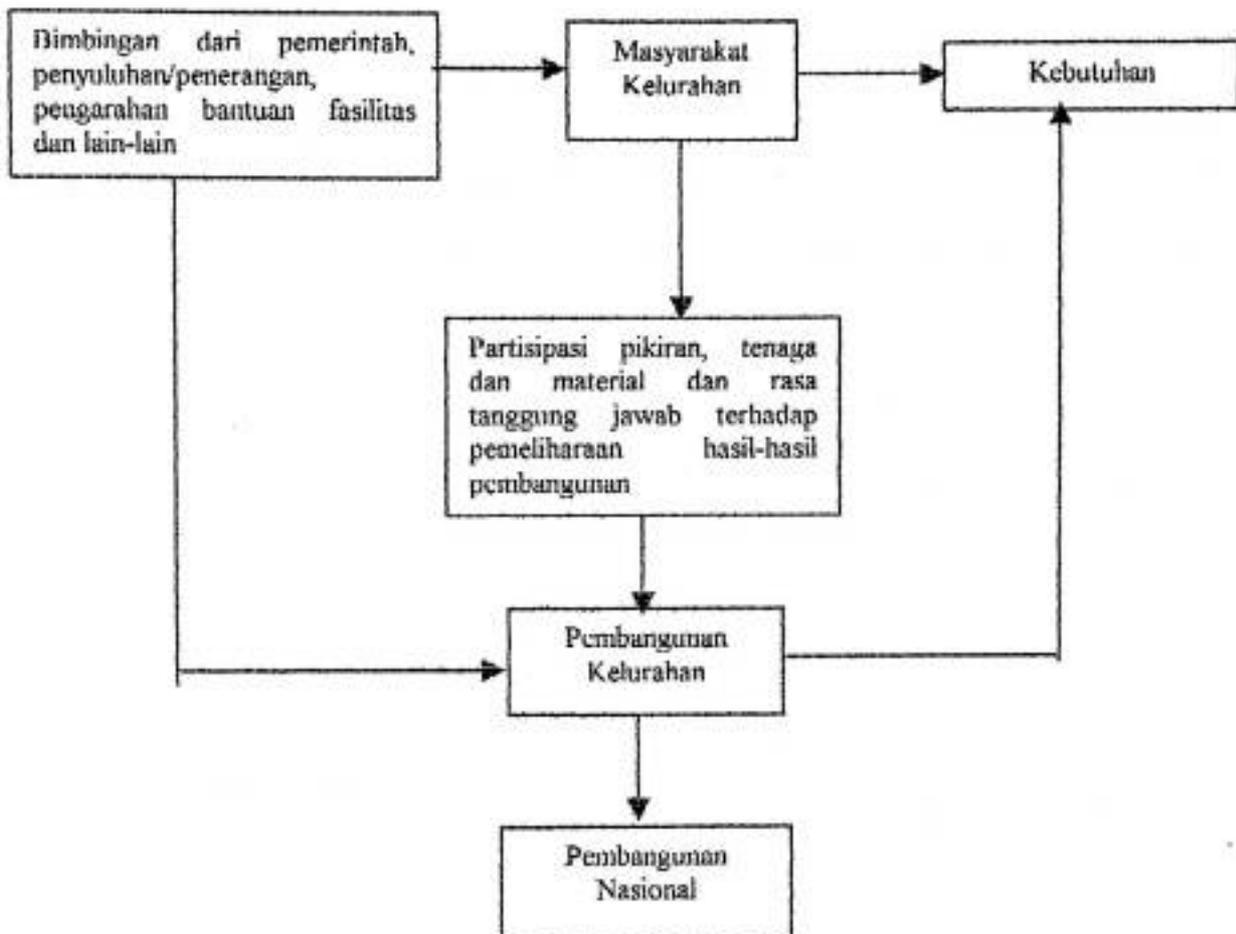
Berdasarkan penjelasan dan rumusan tersebut diatas, maka kerangka pikir yang mendasari penelitian ini ialah bimbingan pemerintah berupa, penyuluhan/penerangan pemberian pengarahan, pemberian rangsangan berupa fasilitas serta pendekatan manusiawi dalam upaya sosialisasi program pembangunan kepada masyarakat akan menimbulkan keyakinan, bahwa program pembangunan yang akan dilaksanakan adalah kebutuhan masyarakat itu sendiri. Makin tinggi tingkat kebutuhan masyarakat terhadap usaha yang akan dilaksanakan semakin tinggi pula partisipasi masyarakat yang diberikan.

Sebaliknya jika masyarakat kurang menyadari bahwa program pembangunan yang akan dilaksanakan adalah kebutuhan dan miliknya sendiri, maka sulit diharapkan bahwa masyarakat akan memberikan partisipasinya secara maksimal.

Kerangka teori penelitian secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:



SKEMA KERANGKA TEORI



E. Metode Penelitian

1. Tipe dan dasar penelitian

- a. Tipe penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan di Kecamatan Wajo Kota Makassar.

- b. Dasar penelitian adalah survey yaitu metode yang mengumpulkan data melalui daftar pertanyaan dari sejumlah responden yang dianggap mewakili seluruh populasi.

2. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. ^{Sekunder} Library Studi (Studi Kepustakaan), yaitu pengumpulan data melalui bacaan baik di perpustakaan atau di tempat lain yang memuat keterangan yang terkait dengan masalah penelitian.
- b. Field Research (Studi Lapangan), Yaitu suatu cara yang dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung di lapangan dengan tujuan untuk diintegritaskan dengan teori.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data ada 3 (tiga) cara yang digunakan :

- a. ^{Dan Sekunder} Observasi, yaitu pengumpulan data secara langsung di lapangan. (obyek Penelitian).
- b. Interview, yaitu melakukan wawancara langsung dengan responden terhadap masalah-masalah yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Quiesioner, yaitu mengumpulkan data dengan mempergunakan daftar pertanyaan.

4. Populasi, responden dan informan

- a. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh warga masyarakat 8 Kelurahan di Kecamatan Wajo Kota Makassar. Dari 8

Kelurahan tersebut dipilih 3 kelurahan yang dianggap mewakili seluruh masyarakat sebagai sampel.

- b. Responden, adalah seluruh masyarakat di 3 Kelurahan yang dianggap mewakili seluruh masyarakat yang disampel. Dari 3 Kelurahan tersebut hanya 90 (sembilan puluh) kepala keluarga yang diberikan angket atau pertanyaan untuk dijawab.
- c. Informan, adalah seluruh tokoh masyarakat yang dianggap terkait:
 - Unsur pemerintah, misalnya Camat, Lurah, Ketua ORW dan ORT (termasuk ketua LKMD)
 - Pemuka – pemuka masyarakat lainnya yang tidak termasuk anggota LKMD.

5. Definisi operasional

Walaupun judul skripsi ini yang di tonjolkan adalah partisipasi dalam pembangunan Kelurahan dari Kecamatan Wajo Kota Makassar, tidaklah berarti bahwa peranan pemerintah dalam hal ini Camat dan Lurah diabaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peranan pemerintah masih turut diperhatikan.

- a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan dioperasionalkan melalui indikator sebagai berikut :
 - Partisipasi dalam bentuk pikiran atau ide
 - Partisipasi dalam bentuk tenaga (fisik)
 - Partisipasi dalam bentuk dana atau material

- Partisipasi evaluasi pelaksanaan pembangunan serta kepedulian terhadap pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.
- b. Tingkat sosialisasi program pembangunan dioperasionalkan melalui indikator; penyuluhan, penerangan, pemberian fasilitas yang memang belum dapat diusahakan sendiri oleh masyarakat.

6. Analisis data

Data dianalisis secara kuantitatif dengan dukungan tabel frekuensi dari beberapa variabel yang dijadikan indikator penelitian. Masing-masing jawaban responden akan diberi bobot dengan nilai tertinggi 4 (empat) dan terendah adalah 1 (satu).

Selanjutnya rata-rata skor dari hasil perhitungan akan dikelompokkan sebagai berikut :

- Rata – rata skor > 3 adalah kategori tertinggi
- Rata – rata skor 2 - 3 adalah kategori sedang
- Rata – rata skor < 2 adalah kategori terendah

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Partispasi Masyarakat

Partispasi masyarakat merupakan suatu istilah yang sangat populer terutama bagi negara yang berkembang atau negara yang sedang membangun, karena istilah sering dikaitkan dengan pembangunan. Pengertian partispasi oleh banyak kalangan disamakan keikut sertaan atau turut serta.

Secara etimologi kata partispasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "partispasi" (kata benda) atau turut mengambil bagian sedang "To" partispate (kata kerja) ikut mengambil bagian.

"Partispation (kata keadaan) adalah hal mengambil bagian"⁽⁷⁾

Lebih lanjut, **Drs. M. Syukur Abdullah** dalam bukunya Bunga Rampai Administrasi Pembangunan mengemukakan pengertian partispasi sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan partispasi ialah sikap tanggap masyarakat lokal (Locale responce) terhadap anjuran-anjuran, petunjuk-petunjuk tentang tata cara baru, pemakaian teknologi baru dan kesediaan memberikan pengorbanan (dalam arti Investasi) modal, waktu, tenaga dan uang untuk mencapai tujuan pembangunan"⁽⁸⁾.

Dari pengertian tersebut, partispasi lebih ditekankan pada kemampuan atau kesediaan untuk berkorban dalam bentuk materil dan tenaga selanjutnya **Keith Davis** sebagaimana yang dikutip oleh **Santoso RA Sastro Poetro** mengemukakan definisi partispasi sebagai berikut:

“Partisipasi dari definisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi (perasaan seseorang) dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan”⁽⁹⁾

Dari definisi tersebut diatas, ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan bila ingin diterapkan dalam bidang pembangunan; yaitu :

1. Partisipasi merupakan keterlibatan mental atau perasaan
2. Partisipasi menghendaki adanya pengorbanan fisik dan materi berupa uang dan bahan untuk mencapai tujuan kelompok.
3. Partisipasi merupakan tanggung jawab sebagai anggota kelompok masyarakat.

Dari sisi lain **Coben** dan **Uphof** sebagaimana yang dikutip oleh **Wiwik Sri Widarti** dan kawan-kawan dalam berkala penelitian “Pasca Sarjana” UGM Jilid 9 Nomor 34 mengidentifikasi partisipasi menjadi empat keputusan, yaitu :

“Partisipasi dalam bentuk penerapan keputusan, partisipasi dalam bentuk penerapan hasil keputusan serta partisipasi dalam bentuk evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut merupakan suatu siklus”⁽¹⁰⁾

Dengan demikian partisipasi masyarakat bukan hanya dalam pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan, tetapi partisipasi harus mulai dari perencanaan suatu kegiatan pembangunan, pelaksanaan serta tanggung jawab atas pemeliharaan hasil yang dicapai oleh pembangunan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan **Taliziduhu Ndraha** dimana beliau mengatakan bahwa partisipasi dapat dilakukan dalam beberapa hal yaitu :

- “1. Partisipasi dalam menerima dan memberikan informasi (partisipasi informatif)

2. Partisipasi dalam memberikan tanggapan dan saran dalam terhadap informasi yang diterima baik dalam terhadap informasi yang diterima baik yang bermakna menolak, menerima dengan syarat, atau menerima sepenuhnya.
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan.
4. Partisipasi dalam pelaksanaan operational pembangunan.
5. Partisipasi dalam menerima kembali hasil pembangunan.
6. Partisipasi dalam menilai hasil pembangunan⁽¹¹⁾

Dari beberapa hal yang telah dikemukakan tersebut yang paling penting dalam partisipasi masyarakat adalah kesediaan dan kerelaan/keihlasan dan bukan paksaan atau mobilisasi masyarakat melalui pengaruh kampanye dan lain sebagainya.

Adapun bentuk partisipasi menurut **Keith Davis** yang dikutip oleh **Santoso RA Sastro Poetro** dalam bukunya "Partisipasi, Komunikasi, Persuasif dan Disiplin Dalam Pembangunan" mengemukakan bahwa partisipasi dapat dilihat dalam beberapa bentuk yakni :

1. Partisipasi pikiran (Pyscological partisipation)
2. Partisipasi tenaga (physical Partisipation)
3. Partisipasi pikiran dan tenaga (phycological and physical partisipation)
4. Partisipasi keahlian (participation with skill)
5. Partisipasi barang (Material Participation)
6. Partisipasi Uang (Money Participation)⁽¹²⁾

Selanjutnya **Hoot Steede**, yang dikutip oleh **Drs. Khaeruddin** dalam bukunya "Pembangunan Masyarakat" membagi tahapan-tahapan partisipasi dalam tiga tingkatan yaitu :

- a. Partisipasi inisiatif (Inisiation participasi) adalah partisipasi yang mengandung inisiatif dari pimpinan Desa, baik formal maupun informal atau dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek yang nantinya proyek tersebut merupakan kebutuhan bagi masyarakat.



- b. Partisipasi Legitimasi (Legitimate Participation adalah partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut.
- c. Partisipasi Eksekusi (Execution Participation adalah partisipasi pada tingkat pelaksanaan)⁽¹³⁾

Dari pendapat tersebut di atas jika diperhatikan ternyata mempunyai sudut pandang yang berbeda. Pendapat pertama memandang partisipasi secara umum baik itu masyarakat biasa maupun pemerintah sedang pandangan terakhir yaitu **Hoofs Teede** melihat partisipasi dari fungsi pemerintah sebagai fasilitator pembangunan

Berdasarkan pengertian tersebut di atas bila dikaitkan dengan pembangunan, maka partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang amat penting dan menentukan, walaupun tetap diakui peranan pemerintah dalam proses pembangunan juga penting, namun hasil akhir ditentukan oleh masyarakat, apakah mau menerima atau memelihara hasil pembangunan.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh **Koentjoraningrat** dalam bukunya "Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan" mengemukakan bahwa :

"Partisipasi masyarakat dalam pembangunan lebih menekankan kepada kemauan sendiri, sadar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan, dari sini semua potensi manusia (Tenaga kasar, dan terampil serta dana) diarahkan bagi pelaksanaan pembangunan, baik melalui swadaya gotong royong maupun sumbangan sukarela"⁽¹⁴⁾

Lebih lanjut menurut **Harsono** sebagaimana yang dikutip oleh **Sayogya** dan **Puji Sayogya** dalam bukunya "Sosiologi Pedesaan" mengemukakan bahwa :

“Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam program-program pembangunan ikut dalam kegiatan pembangunan dan memanfaatkan serta menikmati hasil-hasil pembangunan”⁽¹⁵⁾

Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pembangunan, berarti ikut sertanya masyarakat berperan serta dalam proses pembangunan. Partisipasi berwujud dalam bentuk diskusi dalam penyusunan rencana serta pelaksanaan dari pada rencana yang telah ditetapkan bersama.

Dalam proses pembangunan Desa atau Kelurahan pemerintah memegang peranan penting dimana pemerintah mempunyai tugas mengarahkan memfasilitasi untuk menumbuhkan dan membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk itu perlu kiranya pemerintah Desa atau Kelurahan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Ada sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan faktor-faktor tersebut:

- “a. Faktor interen, yakni faktor dari dalam Desa sendiri:
 - adanya kepemimpinan yang positif berpandangan jauh kedepan yang konkrit dan bertanggung jawab.
 - Adanya pengorganisasian yang terarah dan rapih
 - Adanya kesadaran sosial masyarakat
 - Tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi
 - Tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi
 - Letak geografis dan adanya komunikasi
- b. Faktor Exteren, yakni faktor yang datang dari luar:
 - Adanya pengaruh dan hubungan yang konkrit dari pemerintah dan daerah
 - Bantuan yang wajar dan sungguh diperlukan

- Pemberian penghargaan terhadap kelurahan / Desa
- Kompetisi gerak yang sehat dan fisitif dalam pembangunan Desa Kelurahan lain⁻⁽¹⁶⁾

Keselarasan antara faktor Interen dan Extreren akan berdampak positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas jika dikaitkan dengan pembangunan Kelurahan, maka partisipasi masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan mutlak dalam pembangunan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan. Pembangunan tanpa partisipasi adalah suatu hal yang mustahil.

Taliziduhu Ndraha menyatakan bahwa :

“Pembangunan Desa/Kelurahan tidak akan berhasil apa bila tidak ada partisipasi dari masyarakat dan pembangunan itu tidak akan mendapatkan dukungan moril maupun materil pada tahap perencanaan maupun pada pelaksanaanya.”⁻⁽¹⁷⁾

Pembangunan Kelurahan menuntut partisipasi aktif berupa prakarsa, swadaya dari masyarakat dan itu akan timbul apabila masyarakat sudah menyadari bahwa tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat yang bukan saja bertanggung jawab kepada kemaslahatan pribadinya tapi juga ada kepentingan kolektif yang menempati posisi yang paling urgen yang harus diatas kepentingan pribadi atau keluarga.

Dari rasa tanggung jawab kolektif inilah lahir rasa solidaritas yang tinggi untuk turut serta mengembangkan segala kemampuan baik pikiran pada tahapan perencanaan pembangunan materi dan fisik pada tahap pelaksanaan bahkan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Dalam hubungan itu program utama yang seharusnya mendapatkan prioritas pertama dalam pembangunan suatu bangsa atau daerah ialah bagaimana agar masyarakat bisa lepas dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan

B. Peranan Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan akan berhasil baik pada tingkat Nasional maupun pembangunan Daerah apabila dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat. Oleh sebab itu walaupun dalam era reformasi dan tahun perdana Otonomi daerah diharapkan agar semua warga terutama dari daerah-daerah telah mampu menentukan nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing tidak lagi semuanya bergantung dari pemerintah tingkat atasnya yang cenderung terkesan dalam proses penentuan kebijakan ada intervensi dari atas.

Sehubungan dengan itu peranan pemerintah dalam konsepsi ini tidak dimaksudkan seperti diatas, tapi peranan pemerintah dalam konsep skripsi ini berupa dorongan atau stimulasi pemerintah yang tujuannya untuk lebih mengarahkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan masyarakat Desa/Kelurahan . **Taliziduhu Ndraha** dalam bukunya "Metodologi Pemerintah Indonesia" menyatakan bahwa :

"Untuk menciptakan pertumbuhan masyarakat, pemerintah melakukan beberapa usaha dalam mendorong pertumbuhan masyarakat Desa atau Kelurahan misalnya pemerintah bertanggung jawab dalam hal pemberian, pembinaan, pengarahan, pengawasan, bimbingan dan bantuan. Pemerintah bukan hanya diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan masyarakat melainkan bisa mempercepat pertumbuhannya. Salah satu upaya pemerintah



ialah stimulan kepada masyarakat sebagai pendorong tumbuhnya prakarsa dan swdaya masyarakat untuk berkembang⁻⁽¹⁸⁾

Ringkasan dari pandangan tersebut di atas adalah bahwa pemerintah berkewajiban untuk mensosialisasikan seluruh program pembangunan dalam bentuk penyuluhan atau penerangan, pengarahan, bimbingan pemberian bantuan dana dan fasilitas yang belum mampu disiapkan sendiri oleh warga masyarakat.

Selanjutnya **Koentjoraingrat** mengemukakan bahwa :

“Salah satu unsur yang dipandang dominan adalah unsur pemerintah untuk membina mentalitas yang berjiwa pembangunan:

1. Memberi contoh yang baik
2. Memberi perangsang-perangsang yang cocok
3. Dengan persuasi dan penerangan dan
4. Dengan pembinaan dan arahan⁻⁽¹⁹⁾

Dari pandangan tersebut nampak bahwa pada prinsipnya pembangunan akan berjalan dengan baik apabila ada keselarasan antara rasa tanggung jawab pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat sadar bahwa Pembangunan adalah untuk mereka sendiri dan pemerintah sebagai pembina, pengarah dan sekaligus sebagai fasilitator keseluruhan proses pembangunan, maupun sebagai pengatur pemamfatan hasil-hasil pembangunan.

Drs. G. Kartosapoetro dan kawan-kawan dalam bukunya “Desa dan Daerah dengan Tata Pemerintahannya” menjelaskan bahwa:

“Dalam rangka pembangunan pedesaan/Kelurahan pembangunan itu dilaksanakan dalam rangka keseimbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dengan masyarakat desa. Pemerintah memberikan bimbingan, pembinaan, pengarahan, pengawasan dan bantuan teknis serta bantuan lainnya untuk meningkatkan swdaya gotong royong masyarakat untuk selanjutnya dapat berkembang sendiri sesuai dengan tingkat perkembangan desa dari desa ke desa swakarsa dan swasembada⁻⁽²⁰⁾

Sehubungan dengan itu lebih jelas dikemukakan oleh **H. Siagian** dalam bukunya "Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa" bahwa:

"Kedudukan pemerintah sangat dibutuhkan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena pemerintah mempunyai fungsi selaku pemberi pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat. Fungsi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan adalah sebagai stabilisator, motifator dan inofator serta pelopor"⁽²¹⁾

Dengan demikian dalam pembangunan desa, mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam kegiatan dengan upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kreativitasnya. Hal ini ditempuh untuk mempercepat peningkatan/perkembangan Desa atau Kelurahan dengan memperkuat unsur-unsur pengembangan masing-masing Kelurahan atau Desa.

C. Pembangunan Kelurahan

Studi tentang pembangunan merupakan suatu kajian yang tidak pernah habis-habisnya untuk dibahas dan sampai saat ini belum ada kesempatan para ahli tentang batasan pengertian pembangunan. Para ahli memandang pengertian pembangunan dari berbagai persepsi atau sudut pandang yang berbeda satu sama lain, tergantung dari hasil studi dan metode pendekatan yang digunakan.

Pembangunan dilihat dari pendekatan ilmu sosial, akan menghasilkan konklusi yang berbeda apabila pembangunan di pandang dari segi ilmu ekonomi, demikian seterusnya.

Secara etimologis istilah pembangunan berasal dari kata "bangun" diberikan awalan "pe" dengan sisipan "m" dan akhiran "an" akhirnya bermakna hal membangun. Kata bangun setidaknya mengandung 4 arti,

"Pertama "bangun" dalam arti sadar atau siuman. **Kedua** "bangun" dalam arti bangkit atau berdiri. **Ketiga** "Bangun" dalam arti bentuk sesuatu. **Keempat** "bangun" arti kata kerja membuat, mendirikan atau membina"⁽²²⁾

Menurut **Sondang P. Siagion** dalam bukunya "Administrasi Pembangunan" dikemukakan bahwa:

"Pembangunan di definisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembina bangsa (Nation Building)"⁽²³⁾

Selanjutnya **Nico. S. Nordholt** mengemukakan pengertian pembangunan sebagai berikut:

"Pembangunan adalah perubahan untuk kemajuan watak pembangunan selaku bergerak dan berubah maju. Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan kearah tinjauan yang ingin dicapai"⁽²⁴⁾

Dari dua pengertian tersebut diatas mengandung unsur-unsur perubahan pertumbuhan, kemajuan perbaikan. Jadi pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan, perubahan dalam upaya mencapai kemajuan (modernisasi) yang dilakukan secara berencana untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan

Berkaitan dengan defenisi pembangunan, **Coralie Brayant** dan **Loise** sebagaimana yang dikutipkan oleh **Taliziduhu Ndraha**, mengemukakan bahwa:

"Pembangunan diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya"⁽²⁵⁾

Terhadap lima implikasi utama pada pengertian tersebut, yaitu :

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia baik individu maupun kelompok (Capacity)
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan (Equity)
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan pada masyarakat itu dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (Surtaimability)
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu dengan negara yang lain dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan saling menghormati. (Interdependence)¹²⁶⁾

Dari pengertian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pembangunan ialah suatu usaha bersama menuju kepada perbaikan taraf hidup secara pribadi maupun secara kelompok dimana dalam prosesnya terdapat dua kelompok yang saling bekerja sama disebut pemerintah di tingkat (P) dan masyarakat atau disingkat (CM) dimana masyarakat sebagai subyek dan sekaligus sebagai obyek pembangunan, sedang pemerintah (P) sebagai penyuluh, pemberi penerangan, bimbingan dan bantuan yang belum dapat disiapkan sendiri oleh masyarakat berupa bantuan hubungan keluar dan kedalam sehubungan dengan pengadaan sarana/prasarana atau alat – alat teknis yang belum dimiliki oleh daerah-daerah.

Kelurahan / Desa adalah suatu wilayah yang paling kecil dalam sistim pemerintah di Indonesia yang memiliki pemerintah sendiri yang disebut Lurah atau Kepala Desa yang memiliki batas wilayah tertentu dan masyarakat atau rakyat tertentu pula.

Perlu dikemukakan bahwa pada prinsipnya Kelurahan dan Desa sama saja walaupun dalam Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tidak ada rumusan yang jelas mengenai Kelurahan tapi kalau diperhatikan dalam praktek pemerintahan sehari - hari tidak ada perbedaan prinsipil sehingga rumusan Kelurahan tidak ada yang jelas, mungkin karena istilah Kelurahan dengan Desa perbedaannya hanya sedikit saja.

Sehubungan dengan itu dalam tulisan ini akan dijelaskan rumusan Kelurahan sebagai berikut :

“Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan / atau kota dibawah Kecamatan”⁽²⁷⁾

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui perbedaan antara kelurahan dan Desa dimana wilayah kelurahan berada diwilayah Kelurahan atau wilayah perkotaan sedangkan Desa adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan untuk mengurus, mengatur kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakatnya dan hanya berada di daerah kabupaten.

Menurut Undang - undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah disebutkan bahwa :

“Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur desa mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistim pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten”⁽²⁸⁾

Dari rumusan tersebut dapat diketahui dan di pahami bahwa Desa merupakan daerah terkecil dibawah kecamatan yang agak otonom mengatur dan

mengurus rumah tangga desanya sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang tidak termasuk urusan pemerintahan umum yang dikecualikan berdasarkan pasal 7 dan 9 undang - undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah.

Sebagaimana rumusan Kelurahan tersebut di atas menunjukkan bahwa perbedaan Desa dan Kelurahan hanya terletak pada adanya kewenangan mengurus dan mengatur bagi Desa sedangkan Kelurahan hanya merupakan wilayah kerja Lurah sebagai aparat Kabupaten dan Kota yang secara struktural berada di bawah Camat dan melaksanakan tugas pemerintah kabupaten atau yang berada di wilayah kerjanya.

Sehubungan dengan itu maka pembangunan Kelurahan dimaksud dalam tulisan ini yaitu upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut meliputi kegiatan yang termasuk di programkan pemerintah kabupaten maupun yang timbul dari prakarsa masyarakat sendiri berdasarkan kebutuhan yang dirasakan mendesak untuk dipenuhi, sementara kegiatan tersebut sementara belum terjangkau oleh program pemerintah kabupaten / kota.

D. Strategi Pembangunan Desa /Kelurahan

Tujuan dan arah pembangunan dijabarkan GBHN, pembangunan nasional bertujuan membangun manusia seutuhnya dalam masyarakat gemah rapi regeh rapih, yaitu masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Arah dan tujuan

pembangunan Desa/Kelurahan selanjutnya dirumuskan dalam bentuk trilogi pembangunan Desa/Kelurahan sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan perekonomian Desa/Kelurahan

Pembangunan Kelurahan pertama-tama harus ditujukan dan diarahkan untuk terciptanya pertumbuhan perekonomian Kelurahan yang baik dan sehat. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan dan peningkatan kegiatan usaha masyarakat secara terpadu pada bidang peternakan, perikanan, industri dan jasa.

Usaha tersebut dapat ditempuh, dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui penyuluhan dan latihan-latihan usaha. Selain itu, ditunjang pula dengan proyek-proyek bantuan pemerintah dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi Kelurahan. Hal tersebut dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, bantuan tenaga ahli dan permodalan.

Dengan hidupnya perekonomian Kelurahan dan terciptanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang lebih luas lagi.

2. Pemerataan pembangunan

Pembangunan Kelurahan harus menciptakan tersedianya kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk memperoleh pendidikan dan perlindungan hukum serta kemerdekaan menentukan dan menjelaskan agama yang diyakininya.

Pembangunan diharapkan tidak hanya dinikmati oleh penduduk kota saja. Namun, harus benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat sampai ke pelosok-pelosok nusantara. Pemerataan pembangunan berarti menyebarluaskan hasil-hasil pembangunan supaya dapat dirasakan seluruh warga, baik di Desa/Kelurahan maupun di kota.

3. Terciptanya kestabilan dan keamanan Desa/Kelurahan

Pembangunan Desa/Kelurahan harus diarahkan kepada terciptanya kestabilan masyarakat yang dinamis. Pembangunan Kelurahan harus mampu menciptakan ketentraman dan keamanan masyarakat.

Kondisi demikian dapat dicapai dengan adanya kesadaran masyarakat untuk menciptakan kondisi yang tertib dan aman. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya perlu adanya usaha untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang aman dan tertib.

Tingginya taraf hidup atau perekonomian masyarakat belum menjamin tercapainya kesejahteraan warga seandainya Kelurahan tersebut dalam keadaan tidak aman. Demikian pula sebaliknya, keamanan dan ketertiban dapat dicapai setelah kemajuan ekonomi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh warganya. Dengan demikian, ketiga arah trilogi pembangunan ini harus berjalan secara bersama-sama. Asas Pembangunan Desa / Kelurahan .



Asas pembangunan Desa/ Kelurahan sejalan dengan asas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam GBHN. Asas-asas pembangunan Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut:

1. Asas mamfaat

Setiap kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan harus melihat besarnya manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara secara nasional, baik waktu sekarang maupun yang akan datang.

2. Asas usaha bersama dan kekeluargaan

Setiap pembangunan Desa/Kelurahan harus melibatkan warga Kelurahan mulai perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharannya. Pembangunan dilaksanakan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat sesuai dengan peranan dan kemampuannya.

3. Asas demokrasi

Pembangunan Desa/Kelurahan harus disesuaikan dengan asas demokrasi. Masyarakat diberi hak dengan kedudukan yang sama untuk mengeluarkan aspirasinya dalam kegiatan pembangunan melalui wadah lembaga masyarakat yang ada. Dengan demikian, warga desa/ Kelurahan tidak mendapat paksaan untuk ikut berperan dalam pembangunan.

4. Asas adil dan merata.

Pembangunan Desa/Kelurahan harus dapat dinikmati oleh seluruh warga Desa / Kelurahan baik langsung maupun tidak langsung . Mamfaat dari

hasil-hasil pembangunan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat secara adil dan merata tanpa membedakan golongan

5. Asas perikehidupan dan keseimbangan

Pembangunan Desa/Kelurahan bukan hanya diarahkan pada suatu tujuan tertentu saja, tetapi harus mempunyai tujuan dan arah yang universal, menyentuh semua aspek kehidupan secara seimbang. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah.

6. Asas kesadaran hukum

Dalam setiap langkah pembangunan benar-benar diperhatikan secara sadar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hukum tersebut dijalankan secara jujur dan tegas.

7. Asas kepercayaan pada kekuatan sendiri

Pembangunan di Desa/Kelurahan harus disandarkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Dengan demikian, akan tumbuh dan berkembang swadya masyarakat yang bersandikan pada kepribadian bangsa Indonesia, tidak tergantung dan dikendalikan oleh bangsa lain.

Selain asas-asas tersebut pembangunan Desa /Kelurahan harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Prinsip integritas

Pembangunan Desa/Kelurahan harus berpegang pada prinsip integritas dari satu bidang dengan bidang lainnya. Satu kesatuan gerak dan tindakan

secara nasional. Hal ini baru berlaku untuk pemerintah Kelurahan dan pemerintah di atasnya hingga ke pemerintah pusat integritas diperlukan dalam rangka mencapai kesatuan arah dan tujuan pembangunan demi kepentingan masyarakat itu sendiri dan kepentingan pemerintah.

b. Prinsip keseimbangan

Pembangunan di Desa/Kelurahan harus mempunyai keseimbangan secara proposorsional dari semua segi kehidupan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, serta keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan kemampuan kerja, dan yang paling penting adalah keseimbangan antara dana yang dikeluarkan dengan mamfaat atau hasil yang dapat dicapai oleh suatu proyek.

c. Prinsip kesinambungan

Pembangunan yang dilakukan sekarang harus merupakan kelanjutan atau penyempurnaan dari program yang lain lalu serta berorientasi pada sasaran jangka panjang

d. Prinsip swadaya

Pembangunan di Kelurahan harus mampu mendorong masyarakat kearah swadaya sehingga tidak menimbulkan ketergantungan kepada pemerintah. Program pemerintah lebih bersifat stimulan dalam membangun Kelurahan, kecuali pada proyek besar yang berada diluar kemampuan masyarakat

Kelurahan. Tugas pembangunan disini adalah membangkitkan dan merangsang partisipasi masyarakat.

Kebijaksanaan pembangunan Kelurahan diarahkan untuk mencapai tujuan jangka panjang, yaitu meletakkan dasar-dasar pembangunan nasional yang sehat dan kuat dimana Kelurahan merupakan suatu pusat ekonomi terkecil. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan Kelurahan adalah :

- a. Pembangunan Kelurahan dikaitkan dengan pembangunan kota-kota dan sedang, yang dapat mempengaruhi daerah sekitarnya, baik sebagai pengumpul hasil-hasil produksi dan penyalur kebutuhan – kebutuhan pokok masyarakat sehingga dengan demikian pembangunan Kelurahan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah
- b. Pembangunan Kelurahan dilaksanakan dalam keseimbangan kewajiban yang serasi antar pemerintah dan masyarakat, sehingga pembangunan Kelurahan perlu mengarahkan pembangunan masyarakat Kelurahan untuk berpartisipasi baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemamfatan hasil serta penilaian hasil-hasilnya. Untuk itu perlu penyempurnaan struktur dan peningkatan aparatur pemerintah Kelurahan, dengan memfungsikan LKMD agar mampu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan bantuan, bimbingan yang terus menerus pada pemerintah Kelurahan dan masyarakat Kelurahan.

- c. Pembangunan Kelurahan meliputi berbagai aspek kehidupan dan terdiri berbagai sektor yang saling berkaitan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Kelurahan.
- d. Pembangunan kelurahan berkaitan dengan perluasan lapangan pekerjaan, baik disektor Industri, perikanan, kelautandan perdagangan maupun disektor lainnya.
- e. Dalam menyusun program-program pembangunan Kelurahan perlu disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan setempat yang menggerak dan memanfaatkan sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan.
- f. Dalam pembangunan Kelurahan perlu lebih memperhatikan daerah-daerah yang padat penduduknya. Sejalan dengan pokok -pokok kebijaksanaan tersebut dengan strategi-strategi sebagai berikut :
 - Mengembangkan dan meningkatkan usaha masyarakat secara terpadu dibidang peternakan, perikanan serta bidang-bidang lainnya seperti industri kecil, kerajinan rakyat.
 - Penelitian wilayah Kelurahan untuk mengetahui potensi masing-masing wilayah, penyusunan program secara terpadu yang sesuai dengan wilayah yang bersangkutan
 - Meningkatkan usaha pelaksanaan KB serta melaksanakan.
 - Peningkatan keterampilan penduduk, khususnya para pemuda untuk mengembangkan kewiraswastaan di Kelurahan sebagai kader

pembangunan Kelurahan, yang dapat mengelola potensi-potensi yang tersedia.

- Meningkatkan usaha penerangan di Kelurahan melalui bermacam-macam media massa untuk mendorong dan mengembangkan motivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.
- Meningkatkan dan memelihara prasarna yang diperlukan untuk menunjang kegiatan produksi maupun pemasarannya.
- Menyempurnakan struktur dan aparatur pemerintah Kelurahan sehingga mampu mengajak masyarakat Kelurahan untuk berpartisipasi.
- Membina wadah partisipasi dan penyalur pendapat masyarakat Kelurahan, baik dalam bentuk LKMD maupun LMD.
- Melaksanakan usaha yang mengarah kepada kelestarian sumber-sumber alam baik dengan mencegah kerusakan maupun dengan memperbaiki lingkungan.
- Meningkatkan bantuan pembangunan Kelurahan.
- Melaksanakan pembinaan Unit Kerja Pembangunan Kelurahan sebagai suatu sistim pembangunan Desa yang menyeluruh dan terpadu.
- Menumbuhkan usaha ekonomi masyarakat dalam rangka pengembangan Kelurahan.

BAB III GAMBARAN SINGKAT WILAYAH KECAMATAN WAJO KOTA MAKASSAR

Sebagaimana diketahui bahwa Kecamatan Wajo adalah salah satu Kecamatan dari 14 Kecamatan di kota Makassar. Kecamatan Wajo sebelum Kota Makassar mengalami perkembangan seperti saat ini merupakan pusat kota dan menjadi pusat perekonomian, perdagangan, perindustrian yang terkenal bukan hanya Sulawesi Selatan tapi juga dikenal sebagai pusat perdagangan Kawasan Indonesia Bagian Timur hingga akhirnya dikenal pula sebagai Kota Metropolitan.

Namun karena perkembangan Kota Makassar, baik dilihat dari wilayahnya penduduknya yang semakin padat sebagai akibat urbanisasi yang setiap tahun semakin meningkat menghendaki perubahan, pergeseran perluasan kota kesebelah selatan dan utara Kota Makassar, maka Kecamatan Wajo seperti yang terlihat sekarang ini sudah hampir merupakan kota mati. Dimana – mana kelihatan reruntuhan gedung-gedung tua yang saat ini satu demi satu mulai direnovasi.

Tidak ada maksud, untuk meremehkan Kecamatan Wajo dari kecamatan – Kecamatan lain. Uraian diatas hanya merupakan ilustrasi untuk menggambarkan secara singkat bagaimana pentingnya kedudukan Kecamatan Wajo pada awal kemerdekaan Republik Indonesia dan bagaimana Kecamatan Wajo sekarang ini khususnya bila dikaitkan dengan partisipasi masyarakatnya dalam menunjang pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut, uraian pada bab ini akan dikemukakan mengenai: keadaan geografisnya, keadaan penduduknya, agama, pendidikan, mata pencaharian dan yang terakhir pada Bab III adalah lembaga partisipasi masyarakat di Kelurahan.

A. Keadaan Geografis

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa Kecamatan Wajo yang berada di Kota Makassar merupakan wilayah yang dulunya menjadi pusat kota yang berbatasan sebelah :

- Utara berbatasan dengan Kecamatan Ujung Tanah.
- Timur berbatasan dengan Kecamatan Bontoala.
- Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ujung Pandang dan,
- Barat berbatasan dengan pelabuhan Makassar.

Wilayah Kecamatan Wajo di Kota Makassar memiliki wilayah yang paling kecil dari 14 Kecamatan di Kota Makassar yang terbagi menjadi 8 Kelurahan sebagai berikut :

1. Kelurahan Pattunuang dengan luas wilayah $0,187 \text{ km}^2$
2. Kelurahan Ende dengan luas wilayah $0,188 \text{ km}^2$
3. Kelurahan Melayu dengan luas wilayah $0,189 \text{ km}^2$
4. Kelurahan Melayu Baru dengan luas wilayah $0,189 \text{ km}^2$
5. Kelurahan Butung dengan luas wilayah $0,187 \text{ km}^2$
6. Kelurahan Mampu dengan luas wilayah $0,186 \text{ km}^2$

7. Kelurahan Malimongan Tua dengan luas wilayah $0,187 \text{ km}^2$

8. Kelurahan Malimongan dengan luas wilayah $0,187 \text{ km}^2$

B. Keadaan Penduduk Agama dan Pendidikan

1. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk yang mendiami Kecamatan Wajo sekarang ini untuk seluruh umur ± 56.814 orang yang terdiri 28.401 laki-laki 28.413 perempuan untuk lebih jelasnya data mengenai penduduk perkelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Wajo
Kota Makassar

No.	Kelurahan	L	P	Jumlah	Keterangan
1	Kelurahan Pattunuang	4359	4344	8703	
2	Kelurahan Ende	2980	4109	7089	
3	Kelurahan Melayu Baru	3088	2999	6087	
4	Kelurahan Melayu	4146	4185	8331	
5	Kelurahan Butung	1340	2029	3369	
6	Kelurahan Mampu	3440	3387	6827	
7	Kelurahan Malimongan Tua	5212	3724	8936	
8	Kelurahan Malimongan	3836	3636	7472	
Jumlah		28401	28413	56814	

Sumber data : Kantor Kecamatan Wajo, 2001

Berdasarkan data tersebut maka Kecamatan Wajo termasuk wilayah terpadat penduduknya di Kota Makassar dimana setiap km^2 dihuni oleh $\pm 37,9$ ribu jiwa.

Jumlah penduduk dilihat dari umur yang produktif berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan menunjukkan angka yang amat

potensial untuk menunjang pembangunan yaitu berjumlah \pm 24.895 jiwa dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III. 2
Jumlah Penduduk Usia Produktif di Kecamatan Wajo
Kota Makassar

No.	Kelurahan	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-60	Ket.
1	Kelurahan Pattunuang	947	801	678	677	671	3774	
2	Kelurahan Ende	797	537	534	550	594	3012	
3	Kelurahan Melayu Baru	523	572	623	609	447	2774	
4	Kelurahan Melayu	695	653	657	656	583	3244	
5	Kelurahan Butung	260	265	266	307	226	1324	
6	Kelurahan Mampu	643	492	517	478	609	2739	
7	Kelurahan Malimongan Tua	823	860	957	917	794	4351	
8	Kelurahan Malimongan	679	727	802	819	650	3683	
Jumlah		5367	4907	5034	5013	4574	24901	

Sumber data : Kantor Kecamatan Wajo, 2001

Berdasarkan tabel III. 2 di atas, bila dibandingkan dengan jumlah penduduk usia yang dianggap kurang produktif yaitu umur 46 sampai 60 ke atas menunjukkan bahwa di Kecamatan Wajo \pm 24 % dari jumlah penduduk yang sudah kurang produktif yaitu kurang lebih 13.533 jiwa.

Perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud penduduk yang kurang produktif tersebut di atas tidak berarti bahwa tidak bekerja sama sekali tapi mereka pada umumnya hanya sebagai pengarah terhadap anak-anaknya untuk berusaha atau menjalankan usaha yang telah dirintis oleh orang tua yang berusia seperti yang tersebut di atas

2. Agama

Selanjutnya jika penduduk dilihat dari segi agama yang dianut, maka di Kecamatan Wajo 75% penduduk asli menganut agama kristen dan 25%

lainnya menganut agama Budha dan Hindu serta Kong Fu Tsu. Sedangkan warga pendatang atau tinggal untuk waktu tertentu karena kontrak pada umumnya beragama Islam untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III. 4
Jumlah Penduduk Menurut Agama Kecamatan Wajo

No.	Agama	Penduduk asli	Penduduk/Kontrak	Jumlah
1	Islam	4549	19289	23838
2	Kristen	19040	9006	28046
3	Hindu	2315	-	2315
4	Budha	2400	60	2460
5	Kong Fu Tzu	55	100	155
	Jumlah	28359	28455	56814

Sumber data : Kantor Kecamatan Wajo, 2001

Jumlah penduduk menurut agama Kecamatan Wajo melihat jumlah penduduk tersebut dari atas menunjukkan bahwa lebih dari 50% penduduk yang ada di Kecamatan Wajo adalah warga pendatang atau hanya tinggal dalam waktu tertentu.

Berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat penelitian bahwa mereka pada umumnya berkegiatan dari pasar sentral dan pelayan – pelayan toko dari sekitar jalan Irian, Sulawesi dan Nusantara dan sebagian lagi karyawan-karyawan perusahaan swasta dari sekitar Kecamatan Wajo.

3. Pendidikan

Salah satu faktor yang menentukan tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat ialah adanya pemahaman masyarakat akan pentingnya

pembangunan, sedangkan pemahaman hal tersebut ada kaitannya tingkat pendidikan masyarakat.

Sehubungan dengan itu, maka pendidikan masyarakat salah sektor pembangunan yang paling penting dan menjadi perhatian yang utama dan pertama bagi pemerintah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel III. 5
Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Wajo

No.	Uraian	Negeri	Swasta	Keterangan
1	Sekolah Dasar	20	2	
2	SLTP	1	6	
3	SMU	-	6	
4	SMK	-	1	
Jumlah		21	15	

Sumber data : Kantor Cabang Dinas P & K Kec. Wajo, 2001

Untuk diwilayah Kecamatan Wajo bila dilihat dari jumlah sekolah mulai dari Sekolah Dasar, SLTP, dan SLTA sesuai data yang diperoleh pada saat penelitian menunjukkan pendidikan cukup mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Sebagai bukti jumlah Sekolah Dasar Negeri 20 buah, dan 2 (dua) SD Swasta, 1 SLTP Negeri, 6 SLTP Swasta, dan 1 SMU Swasta.

Sebaliknya dari jumlah sekolah sekolah tersebut di atas jumlah siswanya kurang. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :



Tabel III. 6
Jumlah Sekolah Menurut Siswa

No.	Jenis Sekolah	Negeri	Swasta	Keterangan
1	Sekolah Dasar	2511	1121	
2	S L T P	1290	932	
3	S M U	-	750	
4	S M K	-	35	
	Jumlah	3801	2838	

Sumber data : Cabang Dinas P & K Kecamatan Wajo, 2001

Memperhatikan data tersebut diatas, nampaknya sekolah di Kecamatan Wajo siswanya sangat kurang. Menurut keterangan yang diperoleh pada saat penelitian keadaan tersebut tidak disebabkan oleh kurangnya anak usia sekolah dari Kecamatan Wajo tapi hal tersebut disebabkan karena anak-anak usia sekolah terbanyak bersekolah diluar Kecamatan Wajo misalnya di Kecamatan Ujung Pandang dari SDN. Sudirman, SDN. Mangkura, SD. Swasta Athirah dan lain-lain di sekitar Kecamatan Wajo.

Ketika ditanyakan, mengapa hal tersebut terjadi, hal akibat adanya sekolah unggulan atau sekolah yang dipopulerkan. Orang tua pada umumnya merasa bahagia dan seolah-olah bangga bila anaknya disebut lulusan sekolah unggulan walaupun kenyataannya bahwa tidak semua lulusan sekolah populer unggul pada sekolah lanjutan bahkan mungkin saja ia jauh ketinggalan dibandingkan dengan siswa lulusan sekolah yang tidak dipopulerkan.

C. Mata Pencaharian

Faktor lain yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat ialah bagaimana kondisi perekonomian yang dialami masyarakat baik secara kolektif maupun secara perorangan/perkepala keluarga.

Seorang dapat memberikan partisipasi secara maksimal terhadap pembangunan apabila masyarakat tersebut telah mampu mengatasi permasalahan keluarganya terutama menyangkut sandang dan pangan.

Kadang seseorang besar keinginannya untuk berpartisipasi seperti yang dikehendaki oleh pemerintah atau masyarakat pada umumnya, tapi karena ia sendiri masih terbelenggu oleh masalah keluarga berupa kebutuhan sandang dan pangan.

Dalam hubungan itu mata pencaharian sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, jika dilihat dari mata pencaharian pada umumnya dari Kecamatan Wajo dapat diharapkan amat besar, karena dari 24895 orang warganya yang dianggap usia produktif dalam tulisan ini (21-45) tahun, 4320 orang pedagang, 2420 pengusaha, 2900 penjual atau pelayan toko, 2080 karyawan perusahaan swasta termasuk bank swasta dan karyawan/buruh pelabuhan, 1013 orang pegawai Negeri 300 orang dan 500 orang lainnya yang mempunyai pekerjaan tidak tentu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III. 7
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian (Usia Produktif)

No.	Mata Pencapaian	Jumlah
1	Pedagang	4320
2	Pengusaha	2420
3	Penjual/Pelayan Toko	2900
4	Karyawan Pengusaha	2080
5	Pegawai Negeri	300
6	Karyawan/Buruh Pelab.	1013
7	Tidak Tentu	500
	Jumlah	13533

Sumber data : Kantor Camat Wajo, 2001

Memperhatikan tabel di atas bila dikaitkan dengan informasi dari beberapa pihak terutama para Lurah menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dari wilayah Kecamatan Wajo baik sekali, terbukti pada saat mengadakan kegiatan yang diprakarsai oleh Lurah setempat, masyarakat sangat antusias membantu baik material, maupun sumbangan lainnya misalnya pikiran dan tenaga.

Hal tersebut dapat dipahami karena warga masyarakat Kecamatan Wajo termasuk telah sejahtera. Hal tersebut mungkin disebabkan karena Kecamatan Wajo termasuk pusat perdagangan Indonesia Kawasan timur, pusat perbelanjaan terbesar dari Sulawesi Selatan.

Perlu dikemukakan dalam tulisan ini bahwa tidaklah berarti penduduk usia dibawah 21 tahun dan diatas 45 tahun dari Kecamatan Wajo tidak punya pekerjaan. Penulis yakin bahwa diantara mereka ada pengusaha, namun

karena tidak ada data terinci maka penduduk usia tersebut dari atas dalam hubungannya dengan mata pencaharian tidak dicantumkan.

D. Kelembagaan Kelurahan

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat pemerintah daerah yang terendah langsung dibawah Kecamatan sebagaimana yang dikemukakan dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Lurah sebagai perangkat pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Untuk terlaksananya tugas Lurah dengan efektif dan efisien, maka dari Kelurahan dikenal adanya beberapa lembaga sebagai wadah kerjasama untuk merumuskan baik masalah pemerintah pembangunan maupun kesejahteraan sosial. Wadah tersebut dikenal dengan kantor Lurah sebagai tempat kegiatan baik secara administratif (ketatausahaan) sekaligus sebagai tempat merumuskan kebijakan pemerintah secara oprasional.

Untuk menyatukan kekuatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan, maka dari Kelurahan dikenal pula suatu lembaga sebagai penghimpun potensi yang ada dalam Kelurahan untuk menunjang pembangunan dari Kelurahan. Lembaga tersebut dikenal dengan istilah-istilah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)

1. Kantor lurah

Kantor Lurah dipimpin oleh seorang Lurah sebagai perangkat pemerintah daerah yang terendah langsung dibawah Camat. Tugas Lurah adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat dalam wilayah kerjanya dengan bantuan dan bimbingan dari Camat.

Selain itu Lurah juga bertanggung jawab terhadap pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat dari wilayahnya.

Berdasarkan Perda Kota Makassar Tahun 2000 Nomor : 16/DPRD/XII/2000, tanggal 23 Desember 2000 susunan organisasi pemerintah kelurahan terdiri dari kepala Kelurahan atau disebut Lurah, Sekertaris Lurah, Kepala seksi pemerintah, Kepala seksi pembangunan dan Kepala seksi kesejahteraan rakyat, serta ada petugas fungsional yaitu Binmas, Babinsa dan PPLKB.

a. Lurah

- Merencanakan teknis operasional segala kegiatan pemerintah, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
- Mengkoordinir pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam wilayahnya.
- Mengevaluasi hasil pelaksanaan pemerintah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat
- Membina ketentraman serta ketertiban masyarakat.

- Dalam menjalankan fungsinya Lurah bertanggung jawab langsung kepada Camat.

b. Sekertaris Lurah

Sekertaris Lurah adalah staff pembantu Lurah dalam melaksanakan administrasi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sekertaris Lurah mempunyai tugas:

- Melaksanakan surat menyurat, mengurus kearsipan dan laporan.
- Melaksanakan urusan keuangan
- Melaksanakan administrasi urusan Pemerintah, pembangunan dan Kemasyarakatan.

c. Kepala seksi Pemerintah

Kepala seksi pemerintah adalah staff dan unsur pembantu Lurah dalam Menjalankan tugas pemerintah dan dalam menjalankan tugas –tugas kepala seksi pemerintah bertanggung jawab langsung kepada lurah.

Tugas kepala seksi pemerintah sebagai berikut:

- Mengumpulkan data dari masyarakat melalui ketua RT menyangkut jumlah penduduk dari segala usia
- Mendata warga untuk dibuatkan kartu penduduk dan kartu rumah tangga
- Menagih pajak dari masyarakat jika ada pajak yang tertunggak

d. Kepala seksi Pembangunan

Kepala seksi pembangunan bertugas juga dalam pembinaan kepada masyarakat dalam hal-hal sebagai berikut :

- Disiplin dalam memelihara ketertiban.
- Memelihara keseimbangan lingkungan hidup termasuk penataan lingkungan
- Pembinaan generasi muda melalui kegiatan olah raga, karang taruna dan lain-lain.
- Pembinaan kesadaran masyarakat melalui kegiatan pembuatan penataran P4 untuk pembinaan agama.

e. Kepala seksi kesejahteraan rakyat

Kepala seksi kesejahteraan rakyat adalah unsur pembantu Lurah dalam menjalankan tugas khususnya pada urusan kesejahteraan masyarakat secara umum misalnya pemberian bantuan pengadaan air bersih, seperti sumur-sumur umum bagi masyarakat yang sulit mendapatkan air bersih.

Tugas dari pada kepala seksi kesejahteraan rakyat meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan kepada masyarakat bagaimana memanfaatkan lahan pekarangan untuk apotik rumah tangga bekerja sama dengan PKK.
- Bekerjasama dengan kelompok PKK untuk menyelesaikan 10 program pokok PKK.
- Adapun susunan organisasi kelurahan dapat dilihat pada halaman lampiran.

2. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa / Kelurahan

Lembaga kelurahan masyarakat Desa atau ditingkat (LKMD) merupakan penyempurnaan dari pada Lembaga Sosial Desa (LSD) setelah adanya Undang - undang No. 28 Tahun 1980 tentang penyempurnaan dan peningkatan fungsi LSD menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat (LKMD).

Pada awalnya Lembaga Sosial (LSD) hanya difokuskan pada peningkatan pembangunan sosial ekonomi saja. Setelah berkembang menjadi LKMD maka sarasannya telah meliputi seluruh aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan.

LKMD merupakan wadah yang mempunyai seluruh aspirasi, partisipasi dan peranan masyarakat dalam membangun, Lembaga Ketahanan Masyarakat membantu lurah dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu. Usaha tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan dari pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat. Selain itu juga bertugas menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangkamengembangkan ketahan masyarakat dari kelurahan.

Fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wadah partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

2. Menanamkan pengertian dan kesadaran penghayatan dan pengamalan pancasila.
3. Menggali dan memanfaatkan semua potensi serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan.
4. Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta warga masyarakat itu sendiri.
5. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
6. Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan.
7. Meningkatkan peranan wanita dan mewujudkan keluarga sejahtera.
8. Membina kerja sama antara lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu pemerintah kelurahan untuk menciptakan ketahanan masyarakat yang mantap.

Susunan organisasi LKMD terdiri dari Ketua Umum, Ketua I, dan Ketua II, Sekretaris dan Bendahara dan sepuluh seksi. Ketua Umum dijabat oleh Lurah, Ketua I adalah di jabat oleh warga masyarakat atau tokoh masyarakat yang dipilih dalam musyawarah, Ketua II adalah Ketua PKK di jabat oleh istri Lurah.

Adapun seksi-seksi LKMD terdiri dari :

1. Seksi Agama
2. Seksi Pemberdayaan P4
3. Seksi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

4. Seksi Pendidikan dan Penerangan
5. Seksi Lingkungan Hidup
6. Seksi Pembangunan, Perekonomian dan Koperasi
7. Seksi Kesehatan, Kependudukan dan KB
8. Seksi Pemuda, Olah Raga dan Kesenian
9. Seksi Kesejahteraan Sosial
10. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

Untuk lebih jelasnya mengenai susunan organisasi LKMD dapat dilihat pada lampiran.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III telah diuraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian meliputi keadaan geografis, keadaan penduduk, agama, pendidikan, kesehatan dan mata pencaharian, dan kelembagaan desa, selanjutnya pada Bab IV ini akan diuraikan beberapa pembahasan dari beberapa penelitian yang meliputi:

A. Usaha Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Keberhasilan pembangunan Kelurahan di lakukan oleh pemerintah dan masyarakat di tentukan oleh besar kecilnya partisipasi masyarakat. Namun partisipasi masyarakat tidak datang dengan sendirinya tapi harus terus di tumbuhkan dan di beri dorongan.

Untuk itu peran pemerintah dalam memberikan dorongan yang tujuannya untuk lebih mengarahkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat perlu terus di tingkatkan untuk mempercepat pertumbuhan masyarakat/ Kelurahan.

Usaha atau dorongan dari pemerintah dapat di lakukan dalam berbagai hal, sebagai berikut :

1. Pemberian penyuluhan/penerangan
2. Pemberian pengarahan
3. Pemberian bantuan atau bantuan
4. Pemberian bantuan atau fasilitas

5. Pemberian penghargaan/pujian
6. Penyelenggaraan perlombaan
7. Pelibatan masyarakat dalam proyek pembangunan.

Ketujuh bentuk usaha atau dorongan dari pemerintah tersebut, penulis uraikan melalui serangkaian penelitian untuk melihat tingkat stimulasi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan sebelum dan sesudah berlangsungnya krisis ekonomi untuk jangka waktu lima tahun terakhir di Kecamatan Wajo.

1. Tingkat pemberian penyuluhan/penerangan

Pemberian penyuluhan/penerangan merupakan salah satu program dari pemerintah dalam pembangunan Kelurahan. Pemberian penyuluhan/penerangan dari pemerintah sangat diperlukan dalam rangka memberi pencerahan dan pengertian kepada masyarakat tentang arti dan mamfaat dari pembangunan yang akan dilaksanakan. Pemberian penyuluhan/penerangan dilakukan dengan mengundang masyarakat secara keseluruhan atau hanya kelompok-kelompok tertentu dan bahkan biasanya dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah penduduk. Kebersihan dari penyuluhan atau penerangan berkaitan dengan kualitas penyuluhan/penerangan sehingga masyarakat dapat mencerna apa yang menjadi tujuan atau keinginan dari penyuluh.

Gambaran tentang tingkat pemberian penyuluhan/penerangan dari pemerintah tentang pembangunan di Kecamatan Wajo sebelum dan selama krisis ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.1
Tingkat Pemberian Penyuluhan/Penerangan dari Pemerintah
Sebelum dan Selama Krisis Ekonomi Dalam 5 tahun Terakhir

N=90 dan N=96

Tingkat Pemberian Penyuluhan/Penerangan	Sebelum Krisis Ekonomi		Selama Krisis Ekonomi	
	F	P(%)	F	P(%)
Sering sekali	1	1,11	1	1,04
Sering	45	50,00	5	5,21
Kadang-kadang	31	34,45	21	21,88
Tidak pernah	13	14,14	69	71,87
Jumlah	90	100	96	100

Sumber : Hasil Analisa Data Primer, 2001

Dari tabel di atas dapat dilihat gambaran bahwa sebelum krisis ekonomi sebagian besar responden mendapatkan penyuluhan/penerangan dari pemerintah walaupun besar responden intensitasnya berbeda-beda. Dari 77 orang responden, sebanyak 45 orang (50%) sering mendapatkan penyuluhan dari pemerintah, hal ini sangat mendukung pelaksanaan pembangunan sehingga mereka sadar dan berani untuk melaksanakan pembangunan untuk kepentingan Kelurahanya sendiri, sebanyak 31 orang (34,45%) responden kadang-kadang mendapatkan penyuluhan/penerangan dari pemerintah, sebanyak 1 orang (1,11%) responden yang sering mendapatkan penyuluhan/penerangan dan sisanya 13 orang (14,14%) responden yang tidak pernah sekali mendapatkan penyuluhan/penerangan dari pemerintah.

Responden yang menjawab tidak pernah mendapatkan penyuluhan/penerangan mengemukakan alasan bahwa mereka tidak pernah diundang untuk menghadiri acara tersebut dan beberapa responden menjawab malas mengikuti acara penyuluhan/penerangan pemerintah.

Tingkat pemberian penyuluhan/penerangan oleh pemerintah setelah diskor mencapai rata-rata 2,38 maka berdasarkan kategori skor dalam penelitian ini dapat dikategorikan sedang.

Selama berlangsungnya krisis ekonomi tingkat pemberian penyuluhan/penerangan dari pemerintah mengalami penurunan yang amat tajam, sebanyak 69 orang (71,87%) responden tidak pernah lagi mendapatkan penyuluhan/penerangan. Dari yang mendapatkan penyuluhan/penerangan, 1 orang (1,04%) responden sering sekali mendapatkan penyuluhan/penerangan, sebanyak 5 orang (5,21%) responden sering mendapatkan penyuluhan dan penerangan dan sebanyak 21 orang (2,88%) kadang-kadang mendapat penyuluhan/penerangan dari pemerintah. Apabila diskor tingkat pemberian penyuluhan/penerangan dari pemerintah selama krisis mencapai rata-rata 1,35 masuk kedalam kategori rendah.

Padahal pada masa krisis ini pemerintah perlu secara aktif menyelenggarakan penyuluhan/penerangan kepada masyarakat mengingat kondisi masyarakat yang mengalami guncangan akibat krisis sehingga otomatis dalam partisipasi mengalami penurunan. Dari hasil wawancara yang didapatkan, hal ini disebabkan karena kurangnya dana untuk

menyelenggarakan penyuluhan / penerangan, kegiatan ini jarang diadakan lagi.

2. Tingkat pemberian pengarahan

Pemberian pengarahan dari pemerintah merupakan salah satu bentuk stimulasi yang penting dalam proses pembangunan. Sebelum suatu program pembangunan dilaksanakan terlebih dahulu perlu diberikan agar dalam pelaksanaannya betul-betul terarah dan terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu pengarahan juga diperlukan guna membantu masyarakat Kelurahan memprogram sendiri pembangunan berikutnya. Untuk itu diperlukan kualitas komunikasi yang baik, jelas dan betul-betul terarah, sehingga sasaran yang ingin dicapai dapat terwujud.

Untuk melihat tingkat pemberian pengarahan oleh pemerintah sebelum pelaksanaan pembangunan dilaksanakan di Kecamatan Wajo dalam jangka waktu lima tahun terakhir sebelum dan selama krisis ekonomi berlangsung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.2
Tingkat Pemberian Pengarahan oleh Pemerintah
Sebelum & Selama Krisis Ekonomi Dalam 5 tahun Terakhir

N=90 dan N=96

Tingkat Pemberian Pengarahan	Sebelum Krisis Ekonomi		Selama Krisis Ekonomi	
	F	P(%)	F	P(%)
	1	1,11	1	1,04
Sering sekali	41	45,56	5	5,21
Sering	32	35,56	17	17,71
Kadang-kadang	16	17,78	73	76,04
Tidak pernah	90	100	96	100
Jumlah				

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 74 orang (82,22%) mendapat pengarahan dari pemerintah walaupun tingkatnya berbeda-beda, sebanyak 1 orang (1,11%) sering sekali mendapatkan pengarahan dari pemerintah, responden yang sering mendapatkan pengarahan sebanyak 41 orang (45,56%), sebanyak 32 orang (35,56%) kadang-kadang mendapatkan pengarahan dari pemerintah sebelum pelaksanaan pembangunan dan sisanya sebanyak 16 orang (17,78%) yang tidak pernah mendapatkan pengarahan dari pemerintah, apabila diberi skor mencapai rata-rata 2,3 sehingga dikategorikan sedang.

Selama berlangsungnya krisis ekonomi sebanyak 23 orang responden yang mendapatkan pengarahan sebelum pelaksanaan pembangunan, ini menunjukkan penurunan tiga kali lipat dibanding sebelum krisis ekonomi. Dari responden yang mendapatkan pengarahan sebanyak 1 orang (1,04%) yang sering sekali mendapatkan pengarahan sebanyak 73 orang (76,04%) atau mengalami peningkatan lebih empat kali lipat. Dimasa krisis ekonomi berlangsung tingkat pengarahan pemerintah mencapai rata-rata 1,31 sehingga masuk dalam kategori rendah.

3. Tingkat pemberian bimbingan/pembinaan

Pemberian bimbingan/pembinaan yang merupakan bagian dari stimulasi pemerintah dapat dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok kerja dalam masyarakat seperti kelompok tani, karang taruna, dasawisma dan lain-lain, kemudian kelompok-kelompok tersebut diberikan

pendidikan dan keterampilan dengan maksud memberi rangsangan agar pelaksanaan pembangunan disegala bidang dapat terwujud, dengan demikian akan dapat memperbaiki dan mempertinggi nilai kehidupan dan penghidupan keluarga, sehingga dapat memberika rasa kepuasan pada kehidupan dan penghidupan serta bisa menyesuaikan dengan arah tujuan pembangunan. Dengan adanya bimbingan tersebut akan menimbulkan kreatifitas didalam masyarakat yang nantinya akan menimbulkan kesadaran untuk menyumbangkan hasil karyanya untuk pembangunan Kelurahan.

Gambaran mengenai tingkat pemberian bimbingan/pembinaan oleh pemerintah di Kecamatan Wajo sebelum dan selama berlangsungnya krisis ekonomi dalam jangka waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.3
Tingkat Pemberian Bimbingan /Pembinaan oleh Pemerintah
Sebelum dan Selama Krisis Dalam 5 tahun Terakhir.

N=90 dan N=96

Tingkat Pemberian Pengarahan	Sebelum Krisis Ekonomi		Selama Krisis Ekonomi	
	F	P(%)	F	P(%)
Sering sekali	1	1,11	-	-
Sering	56	62,22	11	11,46
Kadang-kadang	26	28,89	21	21,88
Tidak pernah	7	7,78	64	66,66
Jumlah	90	100	96	100

Sumber : Hasil Analisa Data Primer, 2001

sebanyak 21 orang (21,88%) yang kadang-kadang mendapat bimbingan/pembinaan dan tidak ada responden yang sering sekali mendapat bimbingan/pembinaan sebanyak 64 orang (66,66%) atau mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Nilai rata-rata skor tingkat pemberian pembinaan/bimbingan yaitu 1,45 sehingga masuk dalam kategori rendah. Rendahnya tingkat pemberian bimbingan/pembinaan oleh pemerintah disebabkan karena tidak berfungsinya kelompok-kelompok kerja yang dibentuk oleh pemerintah bersama dengan masyarakat.

4. Tingkat pemberian bantuan/fasilitas

Dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan, pembangunan proyek sarana dan prasarana sebagai indikasi campur tangan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan, karena uluran tangan pemerintah inilah merupakan pembuka jalan bagi pelaksanaan pembangunan di Kelurahan. Disamping proyek sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah terdapat pula proyek sarana dan prasarana yang dibangun oleh swadaya masyarakat, seperti pembangunan masjid, lapangan olah raga dan lain-lainnya. Terkadang dalam pelaksanaan pembangunan tersebut masyarakat memberikan bantuan dan atau fasilitas untuk memperlancar dan mempercepat pembangunan dari hasil swadaya masyarakat tersebut.

Seperti halnya di Kecamatan Wajo, beberapa pembangunan hasil dari swaya masyarakat mengalami kendala karena kurangnya atau tidak

mencukupinya dana yang ada seperti masjid, untuk itu pemerintah berkewajiban membantu masyarakat untuk mencukupi biaya pembangunan tersebut. Untuk melihat sejauh sampai sejauh mana pemerintah membantu dalam pemberian dana/fasilitas terhadap pembangunan proyek dari hasil swadaya masyarakat sebelum dan selama krisis dalam lima tahun terakhir ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.4
Tingkat Pemberian Bantuan Dana /Fasilitas oleh Pemerintah
Sebelum dan Selama Krisis Dalam 5 tahun Terakhir

N=90 dan N=96

Tingkat Pemberian Bantuan Dana/Fasilitas oleh Pemerintah	Sebelum Krisis Ekonomi		Selama Krisis Ekonomi	
	F	P(%)	F	P(%)
Sering sekali	26	28,88	-	-
Sering	6	6,67	-	-
Kadang-kadang	20	22,22	12	12,50
Tidak pernah	24	26,67	35	36,45
Tidak tahu	14	15,56	49	51,05
Jumlah	90	100	96	100

Sumber : Hasil Analisa Data Princer, 2001

Pada tabel IV 4 terlihat bahwa sebelum krisis ekonomi pemberian bantuan dana/fasilitas oleh pemerintah dalam menutupi kekurangan dan terhadap suatu sarana dan prasarana yang dibangun atau swadaya masyarakat sebanyak 26 orang (28,88 %) responden yang menjawab bahwa pemerintah memberikan bantuan dana/fasilitas, sebanyak 6 orang (6,67%) yang menjawab sering dan sebanyak 20 orang (22,24 %) yang menjawab pemerintah kadang-kadang memberikan bantuan/fasilitas dan 24 orang (15,56 %) responden menjawab tidak tahu. Setelah diskor tentang tingkat pemberian bantuan



dana/fasilitas oleh pemerintah mencapai rata-rata skor 0,91 sehingga masuk dalam kategori rendah.

Selama berlangsungnya krisis ekonomi sebanyak 12 orang (12,50%) responden yang menjawab kadang-kadang pemerintah memberikan bantuan dana/fasilitas, sebanyak 35 orang (36,45%) yang menjawab pemerintah tidak pernah memberikan bantuan dana/fasilitas dan sisanya 49 orang (51,05%) responden yang menjawab tidak tahu. Apabila diskor mengenai tingkat pemberian bantuan dana/fasilitas selama berlangsungnya krisis ekonomi mencapai rata-rata skor 0,61 sehingga masuk dalam kategori rendah.

Rendahnya pemberian bantuan dana/fasilitas oleh pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah kurang memperhatikan pembangunan yang dikerjakan atas swadaya masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah kurang memotivasi dan mewadahi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proyek pembangunan atas swadaya masyarakat berikutnya.

5. Tingkat penyelenggaraan perlombaan

Adanya perlombaan di Kelurahan dan perlombaan-lombaan yang lain diperlukan pula oleh masyarakat maupun pemerintah, karena perlombaan - perlombaan tersebut dapat dipakai sebagai umpan balik dari keduanya untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan. Adanya perlombaan-perlombaan tersebut dapat membangkitkan partisipasi masyarakat untuk bahu membahu atas kerjasama memperbaiki atau membangun Kelurahannyanya

sehingga dapat menjadi yang terbaik diantara Kelurahan -Kelurahan lainnya. Untuk melihat tingkat penyelenggaraan perlombaan di Kecamatan Wajo sebelum dan sesudah krisis ekonomi dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.5
Tingkat Penyelenggaraan Perlombaan Oleh Pemerintah
Sebelumnya dan Selama Krisis ekonomi dalam Jangka Waktu
5 Tahun Terakhir

N=90 dan N=96

Tingkat Penyelenggaraan perlombaan	Sebelum Krisis Ekonomi		Selama Krisis	
	F	P(%)	F	P(%)
Sering sekali	1	1,11	-	-
Sering	73	81,12	7	7,9
Kadang-kadang	13	14,44	34	35,42
Tidak pernah	3	3,33	55	57,92
Jumlah	90	100	96	100

Sumber : Hasil Analisa Data Primer, 2001

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebelum krisis ekonomi sebanyak 87 orang (96,67%) responden menjawab bahwa pernah diadakan perlombaan oleh pemerintah sebanyak 1 orang (1,11%) menjawab sangat sering diadakan perlombaan, sebanyak 73 orang (81,12%) yang menjawab sering dan sebanyak 13 orang (14,44%) yang menjawab kadang-kadang. Sedangkan yang menjawab tidak pernah diadakan perlombaan oleh pemerintah sebanyak 3 orang (3,33%). Adapun jenisnya-jenis perlombaan yang diadakan menurut responden adalah lomba kebersihan antar Kelurahan dan lomba olah raga. Apabila diskor tentang tingkat penyelenggaraan perlombaan yang diadakan

oleh pemerintah mencapai rata-rata skor 2,8 sehingga masuk dalam kategori sedang.

Selama berlangsungnya krisis ekonomi tingkat penyelenggaraan perlombaan mengalami penurunan, sebanyak 41 responden yang menjawab pernah diadakan perlombaan yang terdiri dari sebanyak 7 orang yang mengatakan sering diadakan perlombaan dan sebanyak 34 orang (34%) yang mengatakan kadang-kadang, sedangkan yang menjawab tidak pernah diadakan perlombaan sebanyak 55 orang (57,29%). Apabila di skor tingkat penyelenggaraan perlombaan oleh pemerintah selama berlangsungnya krisis ekonomi mencapai rata-rata 1,5 sehingga dikategorikan rendah.

Dalam krisis ekonomi penyelenggaraan perlombaan sangat diperlukan guna menggairahkan kembali partisipasi masyarakat yang sedang terpuruk akibat krisis, juga sebagai sarana hiburan bagi masyarakat.

6. Tingkat pemberian penghargaan/pujian

Pemberian penghargaan/pujian merupakan salah satu dari upaya pemerintah untuk memotivasi masyarakat dalam upaya melihat sampai sejauh mana keberhasilan dari pembangunan atau kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan tersebut. Pemberian penghargaan/pujian dapat mendorong atau penggerak masyarakat untuk menghasilkan karya-karya yang terbaik yang mereka mampu berikan dan sumbangkan untuk kemajuan di Kelurahanya. Dengan pemberian penghargaan/pujian tersebut dapat merangsang atau

memotivasi masyarakat untuk berkarya lebih baik karena mereka merasa diperhatikan dan diberi dorongan oleh pemerintah.

Untuk melihat sejauh mana tingkat pemberian penghargaan/pujian oleh pemerintah terhadap masyarakat di Kecamatan Wajo sebelum dan selama berlangsungnya krisis ekonomi dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.6
Tingkat Penghargaan/Pujian oleh Pemerintah Sebelum dan Selama Krisis Ekonomi dalam 5 Tahun terakhir.

N=90 dan N=96

Tingkat Pemberian penghargaan/pujian	Sebelum Krisis Ekonomi		Selama Krisis Ekonomi	
	F	P(%)	F	P(%)
Sering sekali	1	1,11	-	-
Sering	73	81,12	7	7,29
Kadang-kadang	13	14,44	34	35,42
Tidak pernah	3	3,33	55	57,29
Jumlah	90	100	96	100

Sumber : Hasil Analisa Data Primer, 2001

Dari tabel IV.6 dapat dilihat bahwa sebanyak 87 orang (96,67%) responden yang menjawab bahwa pemerintah memberikan penghargaan/pujian kepada masyarakat yang terdiri dari sebanyak 1 orang (1,11%) yang menjawab sangat sering. Sebanyak 73 orang (81,12%) yang menjawab sering dan sebanyak 13 orang (14,44%) yang menjawab kadang-kadang, sedangkan yang menjawab tidak sebanyak 3 orang (3,33%). Adapun bentuk penghargaan yang diberikan menurut responden berupa piala dan uang, setelah di skor mengenai tingkat pemberian penghargaan/pujian oleh

pemerintah mencapai rata-rata skor 2,64 sehingga masuk dalam kategori sedang.

Selama berlangsungnya krisis ekonomi sebanyak 41 orang (42,71%) responden yang menjawab bahwa pemerintah memberikan penghargaan/pujian yang terdiri dari sebanyak 7 orang (7,29%) yang menjawab sering dan sebanyak 34 orang (35,42%) yang menjawab kadang-kadang sedangkan yang menjawab kalau pemerintah tidak pernah memberikan penghargaan/pujian sebanyak 55 orang (57,29%) apabila skor tingkat pemberian penghargaan/pujian oleh pemerintah selama berlangsungnya krisis ekonomi mencapai rata-rata skor 1,38 sehingga masuk dalam kategori rendah.

Rendahnya tingkat pemberian penghargaan/pujian selama berlangsungnya krisis ekonomi disebabkan tidak pernah lagi diadakan perlombaan-perlombaan baik antar Kelurahan maupun antar Kecamatan, padahal ini sangat mendukung dalam rangka memotivasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

7. Tingkat pelibatan masyarakat dalam proyek pembangunan

Penggunaan biaya pembangunan yang berasal dari pemerintah maupun dari swadaya gotong royong masyarakat perlu dijelaskan kepada masyarakat atau melibatkan masyarakat secara langsung dalam penggunaan biaya/dana pembangunan dan dalam penentuan jenis-jenis proyek yang akan dilaksanakan dengan menggunakan dana pembangunan tersebut, Sehingga

dengan adanya kejelasan penggunaan dana dan jenis proyek yang akan dilaksanakan akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga pelaksana pembangunan fisik dan non fisik. Untuk melihat sampai sejauh mana pemerintah melibatkan masyarakat dalam proyek pembangunan di Kecamatan Wajo sebelum dan selama berlangsungnya krisis dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.7
Tingkat Pelibatan Masyarakat dalam Proyek yang Dilaksanakan Sebelum dan Selama Krisis Ekonomi dalam 5 Tahun Terakhir

N=90 dan N=96

Tingkat Pelibatan Masyarakat dalam Proyek Pembangunan	Sebelum Krisis Ekonomi		Selama Krisis Ekonomi	
	F	P(%)	F	P(%)
Sering sekali	2	2,22	1	1,04
Sering	21	23,34	9	9,38
Kadang-kadang	1	1,11	2	2,08
Tidak pernah	66	73,33	84	87,5
Jumlah	90	100	96	100

Sumber : Hasil Analisa Data Primer, 2001

Dari tabel IV.7 terlihat bahwa sebelum krisis ekonomi berlangsung sebanyak 24 orang (26,67%) responden yang menjawab bahwa mereka dilibatkan oleh pemerintah dalam proyek yang akan dilaksanakan maupun dalam mengalokasikan dana-dana pembangunan dan yang tidak pernah dilibatkan dalam proyek pembangunan sebanyak 66 orang (73,33%). Dari 24 orang yang dilibatkan oleh pemerintah sebanyak 2 orang (2,22%) responden yang sering sekali dilibatkan oleh pemerintah, sebanyak 21 orang (23,34%) yang sering dan sebanyak 1 orang (1,11%) yang kadang-kadang dilibatkan dalam proyek pembangunan. Sedangkan, Apabila di skor tentang tingkat

pelibatan oleh pemerintah selama berlangsungnya krisis ekonomi mencapai rata-rata 1,54 sehingga masuk kategori rendah

Selama berlangsungnya krisis ekonomi jumlah responden yang terlibat dalam proyek pembangunan mengalami penurunan yaitu sebanyak 12 orang (12,50%) dari yang dilibatkan tersebut sebanyak 1 orang (1,04%) yang sering sekali, sebanyak 9 orang (9,38%) yang sering dan sebanyak 2 orang (2,08) yang kadang-kadang sedangkan yang tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah sebanyak 84 orang (87,50%). Apabila diskor mengenai tingkat pelibatan masyarakat dalam proyek pembangunan mencapai rata-rata skor 1,24 atau masuk dalam kategori rendah.

Rendahnya tingkat pelibatan masyarakat dalam proyek pembangunan menunjukkan pemerintah kurang mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam pembangunan sehingga akan menyebabkan masyarakat merasa diabaikan sehingga partisipasinya dalam pembangunan juga akan menurun.

Setelah menganalisa secara keseluruhan tingkat stimulasi pemerintah dengan menskor secara keseluruhan maka dapat dikatakan bahwa sebelum krisis ekonomi tingkat stimulasi pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dikatakan rendah. Sedangkan selama berlangsungnya krisis ekonomi setelah diskor secara keseluruhan dapat dikatakan rendah.

B. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan di Kecamatan Wajo Kota Makassar

Dalam penelitian tentang hubungan stimulasi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan di Kecamatan Wajo menggunakan sampel atau responden sebanyak 96 orang. Secara terperinci identitas responden mencakup tempat tinggal, lama tinggal, umur, pekerjaan, agama dan pendidikan terakhir.

Tabel IV. 8
Responden Menurut Pendidikan dan Tempat Tinggal

Pendidikan	Tempat Tinggal			Total %
	K. Malimongan Tua	K. Pattunuang	K. Melayu	
Tdk pernah sekolah/ Tdk tamat SD	17 (17,70) 45,95	13 (13,54) 54,17	22 (22,92) 68,86	52 (54,17) -
Tamat SD	5 (5,21) 13,52	5 (5,21) 20,83	6 (6,25) 17,14	16 (16,67) -
Tamat SLTP	3 (3,13) 8,18	4 (4,17) 16,67	2 (2,08) 5,17	9 (9,38) -
Tamat SLTA	9(9,38) 24,32	1 (1,04) 4,17	4 (4,17) 11,43	14 (14,58) -
Sarjana	3(3,13) 8,11	1 (1,04) 4,17	1 (1,04) 2,86	5 (5,21) -
Jumlah	37 (38,53) 100	24 (25) 100	35 (36,46) 100	96 (100) 100

Sumber : Hasil analisa Data Primer, 2001

Pada tabel IV. 8 tentang keadaan responden menurut tempat tinggal dan pendidikan terlihat bahwa responden paling banyak bertempat tinggal di Kelurahan Pattunuang yaitu 38,54 % merupakan Kelurahan yang paling banyak penduduknya di Kecamatan Wajo disusul Kelurahan Malimongan Tua sebesar 36,46% dan Kelurahan Melayu yaitu 25%.

Kemudian berdasarkan tingkat pendidikan responden, yang paling banyak tidak pernah sekolah atau tidak tamat SD yaitu 54,17% disusul

kemudian yang tamat SD yaitu 16,67 % dan yang paling sedikit adalah responden yang berpendidikan sarjana yaitu sebesar 5,21% rendahnya tingkat pendidikan disebabkan karena yang jadi responden memang kebanyakan berumur lebih 30 tahun keatas di mana pada saat itu kesadaran pendidikan masyarakat masih rendah.

Tabel IV.9
Responden Menurut Lama Tinggal

Lama tinggal	Frekuensi	Presentase (%)
Sebelum November 1997 (Kondisi sebelum krisis ekonomi)	90	93,75
Sejak November 1997 s/d Agustus 1999 (Kondisi selama krisis ekonomi)	6	6,25
Jumlah	96	100

Sumber : Hasil Analisa Data Primer, 2001

Tabel IV. 10
Responden Menurut Umur

Umur	Frekuensi	Presentase (%)
< 30 tahun	8	8,33
30 - 39 tahun	27	28,13
40 - 49 tahun	44	45,83
50 tahun ke atas	17	17,71
Jumlah	96	100

Sumber : Hasil Analisa Data Primer, 2001

Pada tabel IV. 9 tentang lama tinggal responden, karena penelitian ini berhubungan dengan krisis dan selama berlangsungnya krisis, responden yang tinggal sebelum krisis yaitu sebelum November 93,75 persen dan yang tinggal selama berlangsungnya krisis ekonomi sebesar 6,25 %.

Pada tabel IV. 10 tentang keadaan responden menurut umur bahwa responden yang paling banyak berumur 40 sampai 49 tahun, sebesar 45,83 %

kemudian berumur 30 – 39 tahun sebesar 28 %, responden yang berumur 50 % tahun keatas 17,71% dan yang paling sedikit adalah responden yang berumur 30 tahun sebesar 8,33%.

Dilihat dari umur responden sebagian besar adalah usia produktif dengan begitu diharapkan partisipasinya tinggi dalam kegiatan pembangunan.

Tabel IV. 11
Responden Menurut Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi	Prosentase (%)
Pedagang / Pengusaha	47	48,96
Pelaut	13	13,54
Pegawai negeri	11	11,46
Pegawai swasta	9	9,38
Pensiunan	5	5,21
Lain - lain	11	11,46
Jumlah	96	37,51

Sumber : Hasil Analisa Data Primer, 2001

Dari tabel IV.11 tentang keadaan responden berdasarkan pekerjaan maka jumlah responden yang paling banyak adalah pedagang/pengusaha sebanyak 47 orang (48,95 %) berikutnya adalah pelaut sebanyak 13 orang (13,54 %) pegawai negeri sebanyak 11 orang (11,46 %) , pegawai swasta sebanyak 9 orang (9,38 %), lain-lain (tukang kayu, satpam dan lain-lain) sebanyak 11 (11,46 %) dan pensiunan sebanyak 5 orang (5,21 %). Banyak responden yang bekerja sebagai pelaut karena didukung oleh kondisi geografis daerah pantai yang memungkinkan berkembangnya sektor pelaut.

Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan Kelurahan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam proses pembangunan, tanpa keterlibatan atau partisipasi aktif masyarakat maka

pembangunan tersebut tidak akan seimbang dan tidak menyentuh secara keseluruhan aspek-aspek yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian akan menyebabkan pembangunan tersebut akan diterima setengah hati bahkan ditolak dan tidak dirasakan oleh masyarakat.

Melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan bukan hanya dalam tahap pelaksanaan (partisipasi fisik), tapi masyarakat dilibatkan mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pengevaluasian dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi dalam beberapa tahap, yaitu;

1. Partisipasi dalam menerima dan memberikan informasi.
2. Partisipasi dalam pemberian tanggapan saran terhadap informasi yang diterima baik yang bermaksud menolak, menerima dengan syarat atau menerima sepenuhnya.
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan
4. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan
5. Partisipasi dalam menerima dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan

Dengan mengikuti tahap-tahap tersebut dan masyarakat dilibatkan secara penuh maka masyarakat akan merasakan betul manfaat dari pembangunan dan akan berusaha memelihara dan mengembangkannya.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yang penulis bagi dalam 5 bentuk, yaitu:

1. Partisipasi non-fisik *ide.*
2. Partisipasi Fisik
3. Partipasi dana (uang)
4. Partisipasi barang (bahan)
5. Partipasi dalam penilaian/pengevaluasian hasil pembangunan

Kelima bentuk partisipasi di atas penulis uraikan melalui serangkaian hasil penelitian untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada masa sebelum krisis dan selama berlangsungnya krisis ekonomi untuk jangka waktu 5 tahun terakhir.

1. Partisipasi Non Fisik

Untuk mencapai hasil efektif pembangunan masyarakat dilibatkan secara penuh dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, Karena masyarakat akan merasa memiliki. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan apabila mereka ikut andil terlibat secara penuh dalam proses pembangunan.

Pada partisipasi non fisik partisipasi masyarakat dapat dilihat mulai dari perencanaan, pemberian informasi sampai pada keterkaitan dalam memberikan buah pikiran berupa usulan, ide, saran masukan dan sanggahan. Partisipasi ini dapat diwujudkan melalui berbagai kesempatan seperti melalui rapat atau pertemuan dengan pemerintah atau diskusi antara masyarakat itu sendiri. Dalam pertemuan atau rapat tersebut akan

berlangsung diskusi atau tukar pikiran antara pemerintah dan masyarakat tentang pembangunan yang akan dilaksanakan.

Perwujudan dari partisipasi non fisik ini dapat disalurkan melalui lembaga resmi yang dibentuk masyarakat di Kelurahan seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai tempat untuk menyalurkan kegiatan masyarakat dalam pembangunan.

Untuk lebih jelasnya mengenai partisipasi non fisik masyarakat dalam pemberian pendapat, ide dan masukan dalam rapat atau pertemuan dalam lima tahun terakhir sebelum dan selama berlangsungnya krisis ekonomi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV. 12
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberian Pendapat, Ide dan Masukan Dalam Rapat atau Pertemuan Sebelum dan Selama Berlangsungnya Krisis Ekonomi untuk Jangka Waktu 5 tahun Terakhir

N = 90 dan N = 96

Keikutsertaan memberikan pendapat, ide dan masukan	Sebelum krisis		Selama krisis	
	F	%	F	%
Sering sekali	6	6.67	5	5.21
Sering	17	18.89	8	8.33
Kadang - kadang	11	12.22	5	5.21
Tidak pernah	9	10	5	5.21
Tidak hadir	47	52.22	73	76.04
Jumlah	90	100	96	100

Sumber : Hasil Analisa Data Primer, 2001

Pada tabel IV.12 responden yang menghadiri rapat sebanyak 43 orang (47,78%) sedangkan responden yang tidak hadir sebanyak 47 orang (52,22%). Dari responden yang menghadiri rapat/pertemuan sebanyak 34



orang (37,78%) yang memberikan pendapat, ide dan masukan yaitu yang sering sekali sebanyak 6 orang (6,69%), sering sebanyak 17 orang (18,89%) dan kadang – kadang sebanyak 11 orang (12,22%) sedangkan sisanya yang 9 orang (10%) walaupun hadir tetapi tidak pernah memberikan ide, pendapat, dan masukan. Kalau diskors mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan pendapat, ide dan masukan sebelum krisis ekonomi mencapai rata – rata skor 2,17 dengan demikian dapat dikategorikan sedang.

Selama berlangsungnya krisis ekonomi, responden yang menghadiri rapat sebanyak 23 orang (23,96%) atau turun hampir dua kali lipat sedangkan responden yang tidak menghadiri rapat sebanyak 73 orang (76,04%) atau naik hampir dua kali lipat dibanding sebelum krisis ekonomi. Dari responden yang menghadiri rapat tersebut sebanyak 18 orang (18,75%) yang memberikan masukan berupa pendapat, ide dan saran dan sisanya 5 orang (5,21%) hadir tetapi tidak memberikan masukan.

Responden yang memberikan masukan sering sekali sebanyak 5 orang (5,21%), sering sebanyak 8 orang (8,33%) dan yang kadang-kadang memberikan masukan sebanyak 5 orang (5,21%) . Apabila diskors mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan pendapat, ide dan masukan selama krisis ekonomi berlangsung mencapai rata – rata skor 0,61 dengan kategori rendah.

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan ide dan saran menurut responden disebabkan karena tidak ada pendapat, ide dan masukan, karena takut salah dan tidak dipersilahkan. Hal ini juga berkaitan dengan tingkat pendidikan dari responden yang rata-rata tidak pernah sekolah/tidak tamat SD dan tamat SD. Padahal partisipasi mereka dalam memberikan masukan - masukan sangat diperlukan karena menyangkut proyek pembangunan apa yang nantinya akan dilakukan di Kelurahanannya sehingga pembangunan tersebut betul - betul dibutuhkan dan bermamfaat untuk masyarakat. Begitupun halnya dengan rendahnya kehadiran dalam rapat/pertemuan yang membahas tentang pembangunan menurut responden disebabkan karena responden memang tidak diundang, sebab bertepatan urusan yang penting dan alasan sibuk di kantor.

Hal ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah tentang bagaimana meningkatkan partisipasi non fisik masyarakat, jangan sampai masyarakat jadi pasif dan hanya jadi penonton dalam pembangunan. Apabila hal ini terus menerus berlangsung akan menyebabkan pembangunan yang dilaksanakan tidak dinikmati atau dirasakan mamfaatnya dan bukan merupakan kebutuhan dari masyarakat. Konsep pembangunan " Top Down " dimana sebuah kebijakan pembangunan sudah diatur oleh pemerintah pusat dan masyarakat hanya menerima saja sudah saatnya dihilangkan atau ditiadakan.

Tabel IV.13
Tingkat Partisipasi Non Fisik Masyarakat Dalam
Memberikan Pendapat, Ide dan Masukan Sebelum
dan Selama Berlangsungnya Krisis dilihat dari Tingkat Pendidikan

N = 34 dan N = 18

Pendi - kan	Tingkat Partisipasi Non Fisik Masyarakat sebelum Krisis Ekonomi			Total (%)	Tingkat Partisipasi Non Fisik Masyarakat selama Krisis Ekonomi			Total (%)
	S. Sering (%)	Sering (%)	Kadang - kadang (%)		S. Sering (%)	Sering (%)	Kadang - kadang (%)	
SD	2(5,88) 33,33	10(29,41) 58,82	8 (23,53) 72,73	20 (58,82) -	1 (5,56) 20	2 (11,11) 25	4 (22,22) 80	7 (38,89) -
SLTP	2(5,88) 33,33	- -	2 (5,88) 18,18	4 (11,76) -	2 (11,11) 40	- -	- -	2 (11,11) -
SLTA	2(5,88) 33,34	5(14,71) 29,41	1 (2,94) 9,09	8 (23,53) -	8 (23,53) 40	4 (22,22) 50	1 (5,56) 20	7 (38,39) -
Sarjana	- -	2(5,88) 11,76	- -	2 (5,88) -	- -	2 (11,11) 25	- -	2 (11,11) -
Jumlah	6(17,65) 100	17(50) 100	11 (32,35) 100	34 (100) 100	5 (27,78) 100	8 (44,44) 100	5 (27,78) 100	18 (100) 100

Sumber : Hasil Analisa Data Primer 2001

Pada tabel IV.13 terlihat bahwa pendidikan kurang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi non fisik masyarakat dalam memberikan ide pendapat dan masukan tentang pembangunan Kelurahan. Sebelum krisis ekonomi yang paling banyak memberikan pendapat, ide dan masukan adalah yang berpendidikan SD yaitu sebanyak 20 orang (58,82%) kemudian yang berpendidikan SLTA sebanyak 8 orang (23,53%). Selama berlangsungnya krisis ekonomi antara yang berpendidikan SD dan SLTA terlihat jumlah yang sama yaitu masing – masing 7 orang (38,89%) sedangkan yang paling sedikit memberikan partisipasi adalah yang berpendidikan sarjana yaitu hanya 2 orang (5,88%) sebelum krisis ekonomi dan 2 orang (11,11%) selama krisis ekonomi.

Meskipun demikian faktor pendidikan sedikit mempengaruhi partisipasi non fisik masyarakat baik pada masa sekarang maupun yang akan datang.

2. Partisipasi Fisik

Diantara bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang merupakan wujud dari rasa tanggung jawab sebagai warga negara adalah partisipasi fisik atau tenaga dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan. Partisipasi fisik diwujudkan melalui keikutsertaan dalam kegiatan kerja bakti/gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan fisik seperti pembersihan jalan, got, tempat ibadah, pembangunan kantor Kelurahan, pos kamling dan lain – lain.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak semuanya dapat secara penuh disebabkan adanya perbedaan kepentingan dan perbedaan keahlian. Untuk melihat lebih jelas tentang partisipasi fisik masyarakat dalam kegiatan kerja bakti/ gotong royong yang dilaksanakan di Kecamatan Wajo selama jangka waktu lima tahun terakhir ini sebelum dan selama berlangsungnya krisis ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.14
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Kerja Bakti / Gotong Royong Sebelum dan Selama Berlangsungnya Krisis Ekonomi untuk Jangka Waktu 5 Tahun

N = 90 dan N = 96

Frekwensi Partisipasi Non Fisik dalam Kegiatan Kerja Bakti / Gotong royong	Sebelum krisis		Selama krisis	
	F	P (%)	F	P (%)
1 kali dalam 2 bulan	1	2.22	-	-
1 kali sebulan	9	10	9	9.38
2 kali sebulan	4	4.44	6	6.25
3 kali sebulan	1	1.11	-	-
4 kali sebulan	68	75.56	27	28.12
8 kali sebulan	6	6.67	-	-
tidak berpartisipasi	-	-	54	56.25
Jumlah	89	100	96	100

Sumber : Hasil Analisa Data Primer, 2000

Dari tabel IV.14 terlihat bahwa sebelum krisis ekonomi responden yang berpartisipasi adalah keseluruhan dari responden sebanyak 90 orang (100%), rata-rata responden ikut kerja bakti/gotong royong sebanyak 4 kali dalam sebulan. Responden yang ikut kerja bakti sebanyak 1 kali dalam 2 bulan yaitu 2 orang (2,22%), 1 kali dalam sebulan sebanyak 9 orang (10%), 2 kali sebulan sebanyak 4 orang (4,44%), 3 kali sebulan sebanyak 1 orang (1,11%), 4 kali sebulan sebanyak 68 orang (75,56%) dan 8 kali sebulan sebanyak 6 orang (6,67%). Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam kerja bakti / gotong royong disebabkan karena tingginya kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat sebagai pelaksana sekaligus yang menikmati hasil – hasil pembangunan. Hal ini merupakan suatu yang perlu ditumbuhkan dalam rangka mencapai tujuan

pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kerja bakti / gotong royong sebelum krisis ekonomi setelah diskors mencapai rata - rata skor 4,47 sehingga dikategorikan tinggi.

Selama berlangsungnya krisis ekonomi seperti yang terlihat pada tabel IV.14 terjadi penurunan yang sangat tajam dalam keikutsertaan dalam kegiatan krisis ekonomi / gotong royong, lebih dari separuh responden tidak ikut berpartisipasi yaitu sebanyak 54 orang (56,25%) dan responden yang ikut kerja bakti / gotong royong sebanyak 42 orang (43,75%). Responden yang ikut kerja bakti 1 kali sebulan sebanyak 9 orang (9,38%), 2 kali sebulan sebanyak 6 orang (6,25%), 4 kali sebulan sebanyak 27 orang (28,12% , dan tidak ada responden yang ikut kerja bakti 1 kali dalam 2 bulan, 3 kali sebulan dan 8 kali sebulan. Apabila diskor tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kerja bakti / gotong royong didapat rata - rata skor, 1,78 sehingga dikategorikan rendah.

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kerja bakti selama krisis ekonomi disebabkan karena terjadi pergeseran nilai - nilai dalam masyarakat, sikap apatis masyarakat terhadap lingkungan dan menurunnya rasa kekeluargaan dan kegotong royongan. Hal ini oleh letak Kecamatan Wajo yang dekat dikemukakan oleh informasi dari aparat pemerintah bahwa telah terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat dan memang diakui telah terjadi penurunan tingkat partisipasi selama

berlangsungnya krisis ekonomi karena masyarakat lebih memfokuskan perhatian bagaimana memenuhi kebutuhan ekonomi kelangsungan hidup.

Peran pemerintah untuk membangkitkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kerja bakti/ gotong royong sangat diharapkan demi kemajuan Kelurahan. Dari beberapa responden yang diwawancarai mengemukakan bahwa alasan tidak ikutnya krisis ekonomi / gotong royong disebabkan karena tidak pernah lagi diadakan kerja bakti seperti sebelumnya (Jumat bersih dan minggu bersih) serta alasan sibuk dalam pekerjaannya. Untuk itu pemerintah perlu kembali mengadakan atau menggiatkan Jumat/minggu bersih seperti sebelumnya.

3. Partisipasi dana/uang

Faktor dana/uang merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pembangunan. Faktor dana/uang merupakan penggerak roda pembangunan dan kekurangan dana/uang merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh daerah-daerah dalam pembangunan begitu pula halnya di Kelurahan. Untuk itu pemerintah perlu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan dana/uang dalam pelaksanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan dana/uang diukur dari jumlah atau besarnya uang yang disumbangkan. Untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan dana/uang dalam pembangunan di Kecamatan Wajo sebelum dan selama

berlangsungnya krisis ekonomi untuk jangka waktu 5 tahun terakhir ini dapat dilihat pada tabel IV.15

Tabel IV. 15
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Memberikan Sumbangan
Dana/uang Sebelum dan Selama Krisis Ekonomi Untuk
Jangka Waktu Lima Tahun Terakhir

N = 90 dan N = 96

Jumlah Sumbangan Dana / Uang	Tingkat partisipasi Masyarakat dalam Memberikan sumbangan Dana/uang sebelum dan Selama krisis		Tingkat partisipasi masyarakat dalam Memberikan sumbangan Dana/uang sebelum dan Selama krisis	
	F	P (%)	F	P (%)
< Rp. 5.000 - Rp. 10.000	48	53.33	21	21.87
> Rp. 10.000 - Rp. 30.000	12	12.33	5	5.21
> Rp. 30.000 - Rp. 50.000	9	10	2	2.08
> Rp. 50.000 - Rp. 100.000	10	11.11	4	4.17
Rp. 100.000 keatas	4	4.45	1	1.04
Tidak berpartisipasi	7	7.78	63	65.63
Jumlah Sumbangan	90	99	96	100

Sumber : Hasil Data Primer, 2001

Pada tabel IV. 15 terlihat bahwa responden yang berpartisipasi sebelum krisis ekonomi sebanyak 83 orang (92,22%) dan yang tidak berpartisipasi sebanyak 7 orang (7,78%), rata – rata yang disumbangkan responden sebelum krisis ekonomi berlangsung sebesar Rp. 22.750. Dari yang berpartisipasi sebanyak 48 orang (53,33%) yang menyumbang < Rp. 5.000 – Rp. 10.000, menyumbang > Rp. 10.000 – Rp. 30.000 sebanyak 12 orang (12,33%), menyumbang > Rp. 30.000 – Rp. 50.000 sebanyak 9 orang (10,00%), menyumbang > Rp. 50.000 – Rp. 100.000 sebanyak 10 orang (11,11%) dan yang menyumbang Rp. 100.000 keatas sebanyak 4

orang (4,45%). Partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan dana/uang apabila diskor rata – rata skor 1,9 sehingga dikategorikan rendah.

Selama berlangsungnya krisis ekonomi partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan dana/uang mengalami penurunan hampir tiga kali lipat dibandingkan sebelum krisis ekonomi. Jumlah responden yang partisipasi sebanyak 33 orang (34.38%) dan yang tidak berpartisipasi sebanyak 63 orang (65,63%). Rata – rata sumbangan menurun sampai Rp. 4.625. Partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan dana/uang selama krisis ekonomi mencapai rata-rata skor 1,75 masuk kategori rendah.

Tabel IV. 16
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Memberikan Dana/Uang
Sebelum Krisis Ekonomi Menurut Pekerjaan

Pekerjaan	Sebelum Krisis Ekonomi					Total (%)
	< Rp. 5.000-10.000 (%)	> Rp. 10.000-30.000 (%)	> Rp. 30.000-50.000 (%)	> Rp. 50.000-100.000 (%)	Rp. 100.000-keatas (%)	
Penjual	34 (40,96) 70,83	4 (4,82) 33,33	3 (3,61) 33,33	1 (1,20) 10	2 (2,41) 50	44 (53,01) -
Pedagang/ Pengusaha	1 (1,20) 4,16	2 (2,41) 4,16	3 (3,61) 33,33	6 (2,3) 60	- -	12 (14,46) -
Pegawai negeri	2 (2,41) 4,16	1 (1,20) 16,67	2 (2,41) 22,22	1 (1,20) 10	2 (2,41) 50	8 (9,63) -
Pegawai swasta	3 (3,61) 6,25	1 (1,20) 8,33	1 (1,20) 11,11	1 (1,20) 10	- -	7 (8,43) -
Pensiunan	2 (2,41) 4,16	1 (1,20) 8,33	- -	- -	- -	- -
lain - lain	6 (7,23) 12,52	2 (2,41) 16,67	- -	1 (1,20) 10	- -	9 (10,84) -
Jumlah	48 (75,83) 100	12 (14,46) 100	9 (10,84) 100	10 (12,05) 100	4 (4,82) 100	83 (100) 100

Sumber : Hasil Analisa Data Primer, 2001

Tabel IV. 17
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Memberikan Dana/Uang
Selama masa Krisis Ekonomi Menurut Pekerjaan

N = 33

Pekerjaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Memberikan Sumbangan Dana/Uang Selama Krisis Ekonomi					Total (%)
	< Rp. 5.000-10.000 (%)	> Rp. 10.000-30.000 (%)	> Rp. 30.000-50.000 (%)	> Rp. 50.000-100.000 (%)	Rp. 100.000-kentans (%)	
Penjual	12 (36,36) 57,14	-	-	1 (3,03) 25	-	13 (39,39)
Pedagang/ Pengusaha	4(12,12) 19,05	1 (3,03) 20	-	-	-	5 (15,15)
Pegawai negeri	1 (3,03) 4,76	3 (9,09) 60	1 (3,03) 50	3 (9,09) 75	-	8 (24,24)
Pegawai swasta	4(12,12) 19,05	-	1 (3,03) 20	-	-	1 (3,03)
lain - lain	2 (2,41) 4,16	1 (1,20) 8,33	-	-	-	1 (3,03)
Jumlah	21 (63,63) 100	5 (15,15) 100	2 (6,06) 100	10 (12,05) 100	1 (3,03) 100	33 (100) 100

Sumber : Hasil Analisa Data Primer, 2001

Pada tabel IV. 16 dan IV. 17 terlihat bahwa ada hubungan antara pekerjaan dan partisipasi dalam menyumbangkan dana/uang dalam kegiatan pembangunan. Penjual merupakan penyumbang yang paling banyak baik sebelum krisis ekonomi maupun selama berlangsungnya krisis ekonomi, yaitu 44 orang (53,01%) sebelum krisis dan 13 orang (39,39%) selama berlangsungnya krisis ekonomi. Dan yang punya pekerjaan tidak menentu penyumbang paling sedikit, baik itu sebelum krisis maupun selama krisis ekonomi yaitu 3 orang (3,61%) sebelum krisis dan 1 orang (3,03%) selama berlangsungnya krisis ekonomi.

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat selama berlangsung krisis ekonomi disebabkan akibat tidak sebandinnya pendapatan dan

pengeluaran untuk kebutuhan hidup akibat harga kebutuhan-kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyumbang dana/uang menurut responden yang diwawancarai sebagian besar menjawab akibat krisis ekonomi, tidak punya uang dan karena memang tidak diminta.

4. Partisipasi barang/material

Partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan bahan/materi dalam rangka pelaksanaan pembangunan diperuntukkan untuk pembangunan secara fisik seperti pembangunan mesjid, kantor lurah, pos kamlin dan lain-lain. Sumbangan yang diberikan dilakukan secara sukarela dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing masyarakat.

Materi/bahan yang disumbangkan oleh masyarakat dalam bentuk sumbangan seperti pasir, semen, beras, seng, paku, kayu, papan, dan lampu jalan. Banyaknya sumbangan yang diberikan mempunyai frekuensi yang berbeda disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Sumbangan berupa bahan/materi tersebut dijadikan dalam bentuk rupiah dan disesuaikan dengan harga masing-masing barang/bahan untuk lebih memudahkan pemberian nilai dari masing-masing bahan/barang tersebut untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan bahan/materi untuk pelaksanaan pembangunan.

Untuk melihat lebih jauh tentang partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan bahan/materi untuk pelaksanaan pembangunan sebelum

dan selama berlangsungnya krisis ekonomi untuk jangka waktu lima tahun terakhir dilihat pada tabel IV.18 dan IV.19 di bawah ini :

Tabel IV.18
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Menyumbang
Barang/Materi Dalam Pembangunan Sebelum
Krisis Untuk 5 Tahun terakhir

N = 90

Banyaknya Barang / Material (dalam bentuk rupiah)	F	P (%)
< Rp. 5.000	10	11.11
Rp. 5.000 - < Rp. 100.000	5	5.56
Rp. 100.000 - < Rp.200.000	1	1.11
Rp. 200.000 - Rp. 500.000	2	2.22
Tidak berpartisipasi	72	80
Jumlah	90	100

Sumber : Hasil Data Primer, 2001

Tabel IV. 19
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Menyumbang Barang/Materi
Dalam Pembangunan Selama Krisis, Untuk 1 Tahun terakhir

N = 96

Banyaknya Barang / Material (dalam bentuk rupiah)	F	P (%)
Rp. 50.000	1	1.04
Rp. 100.000	1	1.04
Rp. 150.000	1	1.04
Rp. 500.000	1	1.04
Tidak berpartisipasi	92	95.84
Jumlah	96	100

Sumber : Hasil Data Primer, 2001

Pada tabel IV. 18 responden yang terlibat menyumbang barang/materi sebelum krisis ekonomi sebanyak 18 orang (20%) dan yang tidak menyumbang sebanyak 72 orang (80%) responden yang menyumbang kurang dari Rp. 5.000, responden yang menyumbang antara

Rp. 5.000- < Rp. 100.000 sebanyak 5 orang (5,56%), responden yang menyumbang antara Rp. 100.000 – Rp. 200.000 sebanyak 1 orang (1,11%) dan responden yang menyumbang antara Rp. 200.000 - <Rp. 500.000 sebanyak 2 orang (2,22%), jenis-jenis barang/materi yang disumbangkan adalah beras, semen, dan pasir. Tingkat partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan barang/materi sebelum krisis ekonomi mencapai rata-rata skor 0,34 dikategorikan rendah.

Selama berlangsungnya krisis ekonomi seperti yang terlihat pada tabel IV. 19 terlihat bahwa jumlah responden yang memberikan sumbangan dalam bentuk barang/materi mengalami perubahan yang sangat besar jumlahnya yang memberi sumbangan cuma 4 orang (4,17%) dan yang tidak menyumbang sebanyak 92 orang (95,84%). Rata-rata sumbangan masing-masing responden sebesar Rp. 200.000 walaupun dari segi kualitas sumbangan masing-masing responden sangat besar tapi dari segi kuantitas (banyak responden) yang menyumbang mengalami penurunan. Jenis-jenis barang yang disumbangkan responden adalah paku, kayu, papan, pasir, seng dan lampu jalan. Apabila diskor mencapai rata-rata skor 0,10 dalam kategori rendah.

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menyumbang barang/materi baik itu sebelum krisis maupun selama berlangsungnya krisis disebabkan adanya kecenderungan masyarakat lebih menyukai menyumbang dalam bentuk uang karena lebih praktis. Dari beberapa



responden yang diwawancarai mengemukakan alasan tidak menyumbang barang/material karena memang tidak punya barang/materi, alasannya sudah menyumbang uang dan sudah menyumbang dalam bentuk tenaga.

Tabel IV.20
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Menyumbang Barang/Materi
Sebelum Krisis Menurut Keikutsertaan Dalam
Proses Perencanaan Pembangunan

N = 18

Keikutsertaan dalam Proses Perencanaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Menyumbang Barang / materi Sebelum Krisis				Total (%)
	<Rp.5.000 (%)	Rp. 5000 < 100.000 (%)	Rp. 100.000 <200.000 (%)	Rp. 200.000 < RP. 500.000 (%)	
Ya	5(27,78)	5(27,78)	-	2(11,11)	12(66,67)
	50	100	-	100	(%)
Tidak	5(27,78)	-	1(5,56)	-	6(33,33)
	50	-	100	-	-
Jumlah	10(55,56)	5(27,78)	1(5,56)	2(11,11)	18(100)
	100		100	100	100

Sumber : Hasil Analisa Data Primer,2001

Tabel IV. 21
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Menyumbang Barang/Materi
selamaKrisis Ekonomi Menurut Keikutsertaan
Dalam Perencanaan Pembangunan

N=4

keikutsertaan dalam Proses Perencanaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Menyumbang Barang / Materi Selama Krisis				Total (%)
	Rp. 50.000 (%)	<100.000 (%)	Rp. 150.000 (%)	Rp. 500.000 (%)	
Ya	1(25)	1(25)	1(25)	1(25)	4(100)
	100	100	100	100	
Tidak	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
Jumlah	1	1	1	1	4(100)
					100

Dari tabel IV. 20 dan IV.21 terlihat bahwa ada pengaruh keikutsertaan menyumbang dalam bentuk barang/materi dengan keikutsertaan dalam proses perencanaan pembangunan. Sebelum krisis ekonomi terlihat responden dalam proses perencanaan paling banyak menyumbang barang/materi yaitu sebanyak 12 orang (66,67%) sebelum krisis ekonomi dan selama krisis ekonomi responden yang ikut dalam perencanaan pembangunan adalah semua responden yang menyumbang dalam bentuk barang /materi yaitu sebanyak 4 orang (100%). Untuk itu peran pemerintah dalam menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyumbang barang/materi sangat besar dalam hal ini pemerintah perlu mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

5. Partisipasi dalam bentuk Menilai/Mengevaluasi hasil Pelaksanaan Pembangunan

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah partisipasi dalam menilai/mengevaluasi hasil pelaksanaan pembangunan. Bentuk penilaian terhadap hasil pembangunan dapat berupa kesesuaian harapan /kebutuhan dan kepuasan masyarakat terhadap pembangunan, kualitas pembangunan serta dampaknya terhadap masyarakat. Biasanya hasil penilaian dapat berupa penerimaan secara penuh, setengah hati bahkan penolakan. Penilaian terhadap pembangunan terutama dalam bentuk penolakan dapat disampaikan melalui forum atau

pertemuan yang diadakan oleh pemerintah dan masyarakat kemudian masyarakat menyampaikan disegala hal yang akan diperbaiki atau ditingkatkan kualitasnya.

Untuk melihat bentuk partisipasi masyarakat dalam menilai/mengevaluasi hasil pelaksanaanya pembangunan di Kecamatan Wajo dapat dilihat pada kesesuaiannya harapan/kebutuhan masyarakat terhadap hasil pembangunan yang telah dilaksanakan sebelum dan selama krisis ekonomi untuk waktu lima tahun ini pada tabel IV. 22 berikut ini ;

Tabel IV. 22
Tingkat Kesesuaian Harapan/Kebutuhan Masyarakat Terhadap Hasil Pembangunan yang Telah diLaksanakan Sebelum dan Selama Krisis Ekonomi dalam Lima Tahun Terakhir

N=90 dan N = 96

Kesesuaian Harapan/Kebutuhan	Sebelum Krisis Ekonomi		Selama Krisis Ekonomi	
	F	P(%)	F	P(%)
Sangat sesuai	1	1,11	1	1,04
Sesuai	66	73,34	30	31,25
Kurang sesuai	21	23,33	46	47,92
Tidak sesuai	2	2,22	19	19,97
Jumlah	90	100	96	100

Sumber : Hasil Analisa Data Primer, 2001

Pada tabel IV.22 terlihat bahwa sebelum krisis ekonomi penilaian masyarakat terhadap hasil pembangunan sudah bagus, sebagian besar responden menjawab sudah sesuai harapan/kebutuhan terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan yaitu sebanyak 66 orang (73,33%) responden yang menjawab sangat sesuai sebanyak 1 orang (1,11%) kurang sesuai sebanyak 21 orang (23,33%) dan yang menjawab tidak sesuai

sebanyak 2 orang (2,22%). Apabila diskor tentang penilaian responden terhadap hasil pelaksanaan pembangunan mencapai skor rata-rata 2,53 atau kategori sedang.

Selama berlangsungnya krisis ekonomi terjadi penurunan lebih dua kali lipat responden yang menjawab sesuai terhadap hasil pelaksanaan pembangunan yaitu 30 orang (31,25%), responden yang menjawab sangat sesuai sebanyak 1 orang (1,04%), responden yang menjawab kurang sesuai sebanyak 46 orang (47,97%), atau naik lebih dari dua kali lipat, dan yang menjawab tidak sesuai sebanyak 19 orang (19,79%). Nilai rata-rata skor mencapai 2,14 sehingga masuk dalam kategori sedang.

Terjadinya penurunan terhadap penilaian kesesuaian harapan/kebutuhan masyarakat terhadap hasil pembangunan pada masa krisis ekonomi disebabkan kurangnya pembangunan yang dilaksanakan akibat menurunnya anggaran untuk pembangunan karena harga-harga bahan baku pembangunan melonjak tajam. Akibat dari melonjaknya harga bahan baku bangunan menyebabkan banyaknya pembangunan terbangkalai bahkan tertunda pelaksanaannya, karena itu di masa krisis pembangunan secara fisik berkurang bahkan hampir tidak ada, ini sesuai dengan penilaian responden dan informan yang menyatakan bahwa di masa krisis hampir tidak ada pembangunan.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisis hasil penelitian yang telah dikemukakan pada Bab IV yang merupakan wujud nyata dari pada usaha-usaha pemerintah dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan di Kecamatan Wajo Kota Makassar, wujud dari usaha pemerintah (Lurah Camat) berupa pemberian bimbingan pengarahannya serta pemberian bantuan baik material maupun dana awal (dana untuk memancing partisipasi masyarakat) maupun dana bantuan lainnya apabila dana yang terkumpul dari masyarakat tidak mencukupi. Hal ini di lihat sebelum krisis ekonomi dan sesudah krisis ekonomi.

Demikian pula mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan, juga dilihat dalam 2 kondisi yaitu sebelum krisis ekonomi dan sesudah krisis ekonomi. Karena tujuan penelitian yang mendasari penulisan skripsi hanya ingin mengetahui sejauh mana tingkat pembinaan, pengarahannya, serta bantuan pemerintah dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan di Kecamatan wajo Kota Makassar.

Tentang adakah hubungan antara tingkat pemberian bimbingan, pembinaan, pengarahannya serta bantuan pemerintah dengan tingkat partisipasi masyarakat, memerlukan penelitian dan kajian tersendiri.

Berdasarkan uraian tersebut berikut di kemukakan kesimpulan dan sarana-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan di Kecamatan Wajo pada saat sebelum krisis dan setelah diskor secara keseluruhan di kategorikan "sedang". Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kerja bakti/gotong royong juga dikategorikan sedang dan yang paling rendah adalah partisipasi dalam menyumbang barang atau material.
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan selama berlangsungnya krisis setelah diskor secara keseluruhan di kategorikan "rendah". partisipasi masyarakat yang paling tinggi adalah partisipasi fisik dan yang paling rendah adalah partisipasi dalam menyumbang barang/material, sedang penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan adalah "sedang".
3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam memelihara hasil-hasil pembangunan Kelurahan di Kecamatan Wajo sebelum dan selama krisis setelah diskor secara keseluruhan di kategorikan "rendah", terutama partisipasi dalam pemeliharaan selokan/saluran air paling rendah.
4. Tingkat partisipasi pemberian bimbingan, pengarahan, stimulasi pemerintah dalam mendorong dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan sebelum krisis dan selama krisis , setelah diskor secara keselurahn di kategorikan sedang, hanya pemberian bantuan dana /

fasilitas dan pelibatan masyarakat dalam proyek pembangunan dikategorikan “rendah”.

B. Saran – saran

- Untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan, hendaknya Camat dan Lurah perlu melestarikan dan melanjutkan program lomba kelompok kerja Kelurahan dengan memberikan penghargaan atau hadiah kepada pemenang, memfokuskan rakyat sebagai obyek dan subyek pembangunan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan berbagai lapisan masyarakat
- Hendaknya Camat dan Lurah memperhatikan faktor-faktor kepemimpinan, keteladanan disamping faktor sosial, ekonomi, sosial budaya, maupun aspek politik.

DAFTAR KUTIPAN

1. Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, **Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa**, Buku III, Depdagri 1996, iii
2. Loekman Soetrisna, **Negara dan Peranannya dalam menciptakan Pembangunan Desa**, Prisma No.1, Januari 1988, hal 17.
3. Santoso RA Sastroe Poetro, **Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan**, Alumni, Bandung, 1998, hal 13.
4. Taliziduhu Ndraha, **Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas**, Rineka Cipta, Jakarta 1990, hal 14.
5. Chiwen Chang, **Rural Asia Marchef Forward (Facus and Rural Agriculture Developmant)**, UPCD Tex book Boord Laguna, Laguna Philipines, 1969, hal 6.
6. Mubyarto, **Pembangunan Manusia dan Pembangunan Pedesaan**, Depdagri, Jakarta, 1982, hal 6.
7. WJS Poerwadarminta Wojowasito, **Kamus Inggris-Indonesia**, Cypus, Jakarta 1981, hal 24.
8. M. Syukur Abdullah, **Bunga Rampai Administrasi Pembangunan, Kumpulan Karangan Tentang Masalah-Masalah Pembangunan, Kepemimpinan dan peranan Birokrasi Dalam Pembangunan Nasional**, Ujung Pandang 1986 hal 79.
9. Santoso RA. Sastropoetro Op Cit hal 15.
10. Wiwik Sri Widarti, **Birokrasi Pembangunan Lokal dan Partisipasi Masyarakat**, BPPS, UGM 9 (3A) Agustus 1996, hal 433.
11. Taliziduhu Ndraha, **Metode Penelitian** Op. Cit.P.125
12. Santoso RA Sastropoetro Op. Cit, hal 16.
13. Drs Khaeruddin, **Pembangunan Masyarakat**, Liberti Yokyakarta, 1992, hal 125.
14. Koentjoraningrat, **Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan**, Gramedia, Jakarta 1974, hal 80.
15. Sayogya dan Puji Sayogya, **Sosiologi Pedesaan**, Gajah Mada University Press, Yokyakarta 1982, hal 49.
16. Depdagri, **Pembangunan Desa**, Jakarta, hal 16-17.

17. Taliziduhu Ndraha, Metode, Op. Cit hal 48.
18. Koentjoroningrat, Op. Cit, hal 10.
19. Drs. G. Kartosapoetro, dkk, **Desa dan Daerah dengan Tata Pemerintahannya**, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hal55.
20. H. Siagian, **Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa Alumni**, Bandung 1983, hal 42.
21. Taliziduhu Ndraha, **Pembangunan Masyarakat**, Op Cit, hal 1.
22. Sondang P. Siagion, **Administrasi Pembangunan**, Haji Mas Agung, Jakarta, 1987 hal 2-7.
23. Nico S. Dordholt, Ojo Dumei, **Kepemimpinan Lokal Dalam Pembangunan Pedesaan**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal 37.
24. Taliziduhu Ndraha, **Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat** "Op Cit, hal, 45.
25. Taliziduhu Ndraha, Ibid hal, 46.
26. **Penyetaraan Desa dan Kelurahan**, Citra Umbara, Bandung, 2000, hal 61.
27. **Undang-Undang, Tentang Pemerintahan Daerah**, Sinar Grafika, Jakarta 1999, hal 5.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Abdullah, M. Syukur, Prop, Dr. 1986, Bunga Rampai Administrasi Pembangunan dan Kumpulan Kerangka tentang Masalah – Masalah Pembangunan Kepemimpinan dan Peranan Birokrasi dalam Pembangunan Nasional, Ujung Pandang.
2. Amirin, M. Tatang, Drs, 1995, Menyusun Rencana Penelitian Penelitian PT Raja Grafindo, Persada, Jakarta.
3. Dordhoff, Nico S, 1987, Kepemimpinan Lokal dalam Pembangunan Pedesaan, Pustaka Sinar Harapan Jakarta.
4. Ditjen PMD, 1996, Perencanaan Partisipatif PMD, Buku III PT. Penebar Swadaya, Jakarta.
5. Kansil, Cst, 1981, Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Aksara Baru, Jakarta
6. Karto Sapotro, Drs, G dkk, 1986, Desa dan Daerah dengan Tata Pemerintahannya, Bina Aksara, Jakarta.
7. Khaeruddin Drs, 1992, Pembangunan Masyarakat, Liberti Yogyakarta
8. Koentjaraningrat, 1974, Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan, Gramedia, Jakarta.
9. Mubiyarto, 1982, Pembangunan Manusia dan Pembangunan Pedesaan, Depdagri, Jakarta.
10. Ndraha, Taliziduhu, 1988, Metode Pemerintahan Indonesia, Bina Aksara, Jakarta
11. Ndraha, Taliziduhu, 1997, Metodologi ilmu Pemerintahan Rineka Cipta, Jakarta
12. Ndraha, Taliziduhu, 1990, Pembangunan Masyarakat mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Rineka Cipta, Jakarta.
13. Pengaturan Desa dan Kelurahan, 2000, Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Citra Umbara, Bandung.
14. Sayoyo dan Pudji Sayogya, RA 1998, Partisipasi Komunikasi, Dan disiplin dalam Pembangunan, Alumni Bandung.
15. Sastro Poetro Santoso, RA 1998, Partisipasi Komunikasi, dan disiplin dalam Pembangunan, Alumni Bandung.

16. Siagian Sondang p, 1987, Admistrasi Pembangunan, Haji Mas Agung, Jakarta
17. Siagian, H, 1983, Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa, Alumni Bandung.
18. Soetrisna Loekman, 1998, Negara dan Peranannya dalam Menciptakan Pembangunan Desa, Prisma No. 1
19. Sri Widarti Wiwik, 1996, Birokrasi Pembangunan Lokal dan Partisipasi Masyarakat, BPS UGM, 9 Yokyakarta
20. Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen ke 2) Tahun 2000
21. GBHN 1999-2004 sesuai Tap MPR No IV/MPR/1999 tentang Garis – garis Besar Haluan Negara dan Beberapa Kelengkapan
22. Undang-Undang no. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Dan Juklaknya, Sinar Grafika, Jakarta.
23. Undang – Undang No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000 – 2004.
24. Usman, Husaini, MPd dan Purnomo Setiady Akbar M.Pd, Dr, 2000, Metode Penelitian Sosial, Bumi Aksara, Jakarta .